



Katalog BPS : 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA MEI 2012



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Mei 2012

ISSN.

No. Publikasi:

Katalog BPS:

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Invitama Abadi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II dan IV menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) Triwulan I (Februari) dan Triwulan II (Mei) tahun 2012. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, daerah perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, September 2012
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

DR. Suryamin
NIP. 1956 0805 1979 03 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xii
Ringkasan Eksekutif	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, <i>Underemployment</i> dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	22
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	23
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	24
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	24
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	24
3. Partisipasi di Dunia Kerja (KILM 1)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	34

4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	38
4.4. KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	42
4.5. KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja	45
4.6. KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	49
5. Indikator Pengangguran	53
5.1. KILM 8. Pengangguran	53
5.2. KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Usia Muda	57
5.3. KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4. KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	63
5.5. KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	67
6. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	70
KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	26
Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	30
Tabel 3. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Usia, Februari dan Mei 2012	31
Tabel 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	35
Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	36
Tabel 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	39
Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	40
Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, Februari dan Mei 2012	43
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012	46
Tabel 10. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/ Informal), Februari dan Mei 2012	50
Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012	50
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka, Februari dan Mei 2012	54
Tabel 13. Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, Februari dan Mei 2012	58
Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	59
Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	61
Tabel 16. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur, Februari dan Mei 2012	63
Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, Februari dan Mei 2012	64

Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, Februari dan Mei 2012	66
Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, Februari dan Mei 2012	68
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	71

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	33
Grafik 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	37
Grafik 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	41
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Februari dan Mei 2012	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012	51
Grafik 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal) dan Provinsi, Februari dan Mei 2012	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	56
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari dan Mei 2012	62
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	65
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	69
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	72
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	75
Lampiran 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	76
Lampiran 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	77
Lampiran 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012	78
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	79
Lampiran 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	80
Lampiran 7. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	81
Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	82
Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012	84
Lampiran 10. Indikator Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	94

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	95
Lampiran 17. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012	96
Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012 ...	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari dan Mei 2012	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, Februari dan Mei 2012	102

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicator of The Labor Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja pada Mei 2012 sebesar 120,70 juta orang, secara absolut naik 0,29 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 (120,41 juta orang). Sementara itu TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Indonesia pada Mei 2012 mengalami penurunan dari 69,66 persen pada Februari 2012 menjadi 69,60 persen pada Mei 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Mei 2012 mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibanding kondisi Februari 2012.

Secara nasional, angka EPR (*Employment to Population Ratio*) pada Mei 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, peningkatan EPR tersebut hanya sebesar 0,11 poin dari angka 65,25 pada Februari 2012 menjadi 65,36 pada Mei 2012. Angka ini bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Mei 2012.

Selama Februari 2012 sampai Mei 2012 terjadi kenaikan persentase penduduk yang bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai), yaitu dari sebesar 33,81 persen pada Februari 2012, meningkat menjadi 34,05 persen pada Mei 2012 berarti ada peningkatan sebesar 0,24 persen. Pola sebaliknya terjadi pada pekerja keluarga yaitu dari 17,29 persen pada Februari 2012, menurun menjadi 16,71 persen pada Mei 2012 terjadi penurunan sebesar 0,58 persen.

Sementara itu, secara nasional pada Mei 2012, proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" mencapai 62,04 persen, yang berarti dari 100 orang pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 62 orang. Namun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin proporsi penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 66,70 persen jauh lebih tinggi dibandingkan secara nasional, yang berarti dari 100 orang pekerja perempuan yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 66 orang.

Komposisi sektoral hasil Sakernas Mei 2012 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, dengan komposisi Sektor Manufaktur dan Sektor Pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,33 persen dan sebesar 0,02 persen, kecuali pada Sektor Jasa-Jasa yang mengalami penurunan sebesar 0,35 persen walaupun secara nasional merupakan sektor yang mendominasi. Penurunan pada sektor ini didukung oleh penurunan yang terjadi pada komponen Sektor Jasa-Jasa, yaitu Sektor Jasa Kemasyarakatan yang turun sebesar 0,23

persen, Sektor Perdagangan turun sebesar 0,15 persen, dan Sektor Transportasi yang turun sebesar 0,07 persen. Kemungkinan hal ini terjadi disebabkan oleh beralihnya mereka bekerja Sektor Manufaktur dan Sektor Pertanian.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2012 sebesar 18,33 persen atau sedikit naik sebesar 0,36 persen poin sehingga pada Mei 2012 menjadi 18,69 persen. Tingkat pekerja paruh waktu pada Mei 2012 yang mencapai 18,69 persen dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang pekerja paruh waktu. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,93 persen. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 57,24 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sejumlah 57 orang adalah perempuan.

Hasil Sakernas selama Februari 2012 hingga Mei 2012 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu yakni lebih dari dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Pada Mei 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di bawah 35 jam jika dibandingkan Februari 2012 yaitu dari 33,44 persen pada Februari 2012 menjadi 32,73 persen pada Mei 2012.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2012, dari sejumlah 113,35 juta orang yang bekerja, 55,05 persennya merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (62,39 juta orang). Dibandingkan keadaan Februari 2012, proporsi penduduk yang bekerja di sektor ini mengalami penurunan yang tentunya diikuti dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Februari 2012 sebesar 55,84 persen yang turun sebesar 0,79 persen poin pada Mei 2012 ini menjadi 55,05 persen. Sementara sektor formal pada Februari 2012 mencapai 44,16 persen dan pada Mei 2012 naik menjadi 44,95 persen.

Selama periode Februari 2012 sampai Mei 2012 TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Indonesia mengalami penurunan. TPT pada Februari 2012 sebesar 6,32 persen, turun menjadi 6,09 persen pada Mei 2012. Angka 6,09 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia ada sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

Sakernas Februari 2012 menghasilkan angka TPT usia muda sebesar 19,08 atau turun sebesar 1,15 persen poin pada Mei 2012 menjadi 17,93 persen. Berdasarkan klasifikasi jenis

kelamin, baik TPT usia muda laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu Februari-Mei 2012, di mana penurunan TPT usia muda pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yang masing-masing turun sebesar 2,73 persen poin dan 0,19 persen poin.

Secara umum dapat dikatakan bahwa TPT menurut tingkat pendidikan cenderung turun selama periode Februari 2012-Mei 2012 pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali pada TPT untuk kelompok tidak pernah sekolah yang naik sebesar 0,41 persen poin dari 2,12 persen pada Februari 2012 menjadi 2,53 persen pada Mei 2012. TPT tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemui pada tingkat pendidikan sekolah menengah dimana pada Februari 2012 TPT pada tingkat pendidikan ini adalah 10,05 persen, sedangkan pada Mei 2012 turun menjadi 9,73.

Pada Mei 2012 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 14,12 juta orang, dimana 7,78 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Apabila dibedakan menurut klasifikasi desa-kota, pada Mei 2012 ini jumlah setengah penganggur lebih banyak di daerah perdesaan yaitu sebesar 9,80 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 4,32 juta orang.

Secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja mengalami kenaikan sekitar 270 ribu orang dari 52,45 juta orang pada Februari 2012 menjadi 52,72 juta orang pada Mei 2012. Pada Mei 2012 tingkat ketidakaktifan adalah 30,40 persen yang naik sebesar 0,06 persen poin dibanding Februari 2012 (30,34 persen). Berdasarkan jenis kelamin, tingkat ketidakaktifan perempuan mengalami peningkatan 0,38 persen poin per seratus penduduk usia kerja pada Februari 2012 menjadi sekitar 47 perempuan per seratus penduduk usia kerja pada Mei 2012. Sedangkan pada laki-laki terjadi penurunan sebesar 0,26 persen poin, dari sebesar 14,33 persen pada Februari 2012 menjadi 14,07 persen pada Mei 2012.

Secara nasional, angka Sakernas Mei 2012 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibanding Sakernas pada triwulan sebelumnya. Angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 61,40 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 24,46 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,39 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,74 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah.

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya monitoring dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicators of the Labor Market*). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatkan akurasi data yang dihasilkan maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei

(Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV) yang penyajian data dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Selama periode Februari 2011-Mei 2012 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Mei 2012.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai Badan Pusat Statistik yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/ sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan/KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilisasi* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (*Employment to Population Ratio/EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

- 3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

- 4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Adalah penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Penduduk usia kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan *underutilisasi* yang besar

dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui, misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Atau, program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/ *discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa, jika data karakteristik tersebut tersedia, untuk menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja. Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat

KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/ karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin menambah jam kerja (KILM 12).

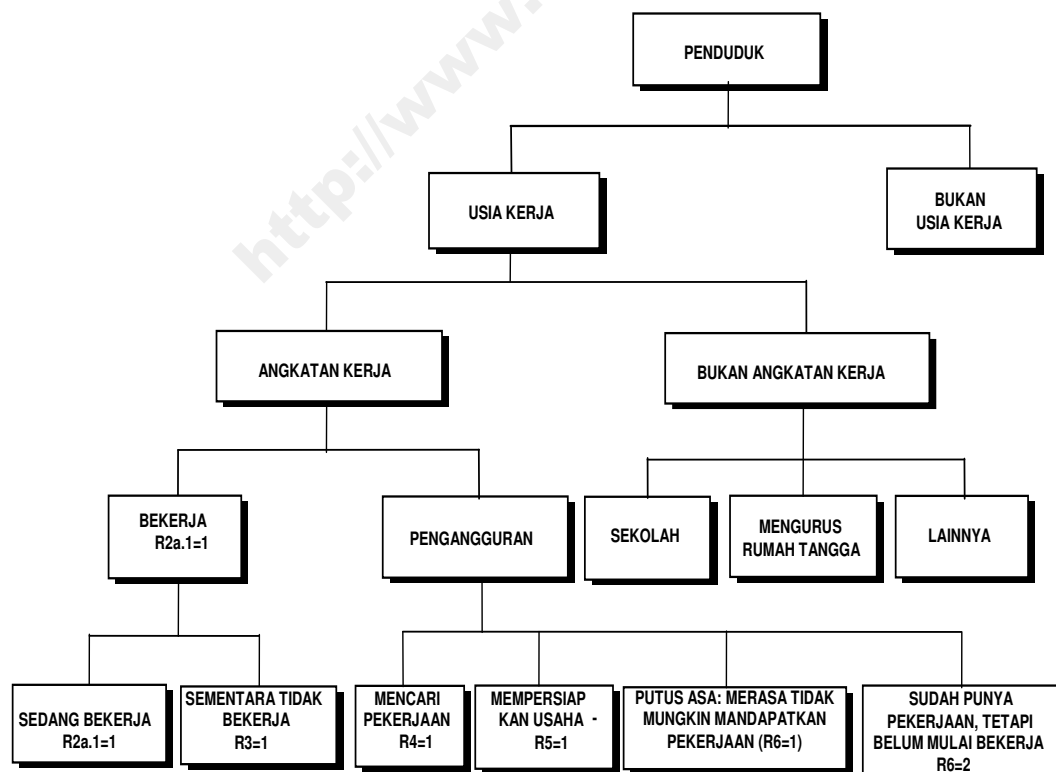
2. PENJELASAN TEKNIS

Pada sub bab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization* (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku “*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods*”, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram di bawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu

yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang

digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) di mana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai *employed* (bekerja).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang (*currently economically active population*) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (*Key Indicator of Labor Market*) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- 2) Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja) dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Usia Muda),

- KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 - 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan) dan KILM 17 (Upah per Jam);
 - 6) Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 - 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja); dan
 - 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin menurut kelompok umur dengan standar sebagai berikut: 15+, 15–24, 15–64, 25–54, 25–34, 35–54, 55–64 dan 65 tahun ke atas.

Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk/*Employment to Population Ratio (EPR)*

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah :

- 1) Berusaha sendiri.
- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- 4) Buruh/karyawan/pegawai.
- 5) Pekerja bebas di pertanian.
- 6) Pekerja bebas di nonpertanian.
- 7) Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - i. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - ii. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - iii. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga rasio pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas dan air;
- 5) Bangunan;

- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
- 7) Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu **A(griculture)**/Pertanian, **M(anufacture)**/Manufaktur dan **S(ervices)**/Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini pekerja paruh waktu yang tanpa disertai kegiatan mencari pekerjaan yang lain dan tidak bersedia untuk menerima pekerjaan tambahan. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

¹ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. *Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods*. Geneva, International Labour Office, 1990.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam ke atas, 50 jam ke atas, dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan².

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, *UNDEREMPLOYMENT* DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan

² Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

³ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, *bukan* jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Usia Muda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "pemuda" mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun⁴, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada resiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi:
 - i. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - ii. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurangi TPAK ($1 - \text{TPAK}$).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai "buruk", misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk

mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah) ---yang bukan merupakan bagian dari Sakernas--- yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistik (*Two Step Heckman*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labor*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intensive*) dan sektor padat modal (*capital intensive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN DAN DISTRIBUSI

PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi.

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja pada Mei 2012 sebesar 120,70 juta orang, secara absolut naik 0,29 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2012 (120,41 juta orang). Dari jumlah angkatan kerja tersebut sekitar 0,55 juta orang penduduk yang bekerja mengalami kenaikan, yaitu dari 112,80 juta orang pada Februari 2012 menjadi 113,35 juta orang pada Mei 2012 (Lampiran 6).

Namun persentase TPAK mengalami penurunan dari 69,66 persen pada Februari 2012 menjadi 69,60 persen pada Mei 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Mei 2012 mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibanding kondisi Februari 2012.

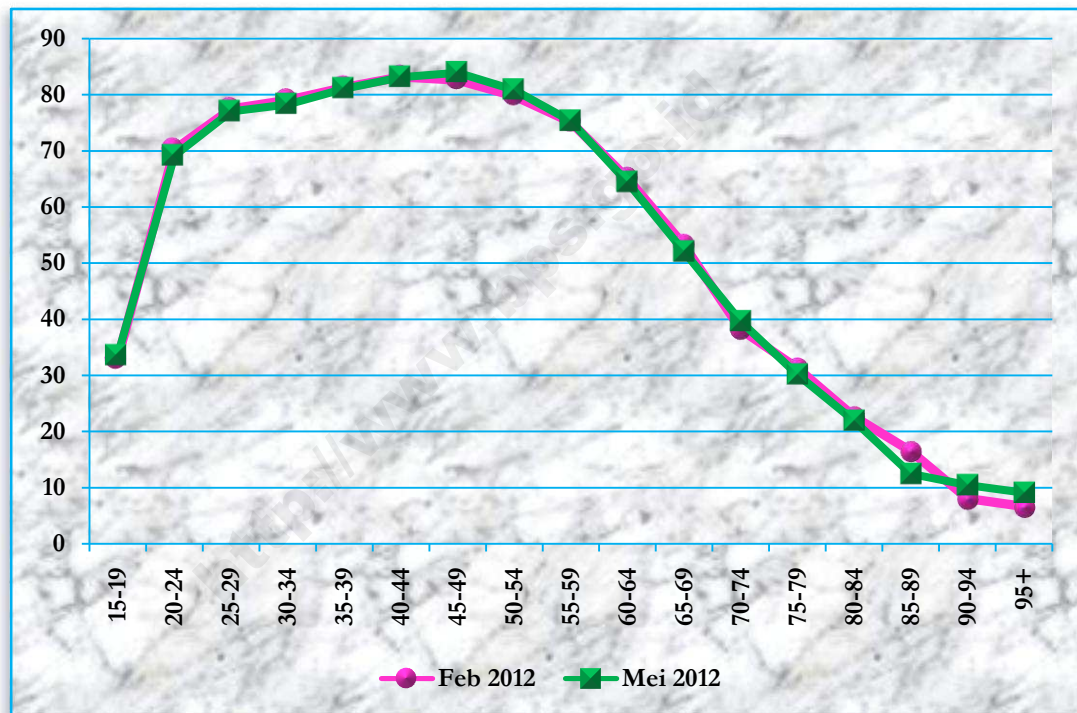
Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin persentase TPAK mengalami penurunan seiring menurunnya TPAK nasional. Terutama TPAK berjenis kelamin perempuan mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin, berbeda dengan TPAK berjenis kelamin laki-laki sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,26 persen poin pada periode Mei 2012 dibandingkan dengan Februari 2012.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur,
Februari dan Mei 2012
(Persen)

Indikator	Februari	Mei
Total	69,66	69,60
Laki-laki	85,67	85,93
Perempuan	53,71	53,33
Perkotaan	67,78	67,43
Perdesaan	71,55	71,78
(15-24)	51,21	50,94
Laki-laki	62,29	62,72
Perempuan	39,99	39,03
Perkotaan	50,47	49,30
Perdesaan	51,94	52,59
(15-64)	71,89	71,82
Laki-laki	87,61	87,93
Perempuan	55,96	55,52
Perkotaan	70,30	70,02
Perdesaan	73,50	73,65
(25-54)	80,34	80,38
Laki-laki	98,07	98,31
Perempuan	62,42	62,25
Perkotaan	79,16	79,17
Perdesaan	81,54	81,61
(25-34)	78,19	77,63
Laki-laki	97,84	98,13
Perempuan	58,51	57,09
Perkotaan	78,53	77,75
Perdesaan	77,84	77,50
(35-54)	81,80	82,25
Laki-laki	98,23	98,44
Perempuan	65,09	65,79
Perkotaan	79,60	80,14
Perdesaan	84,02	84,37
(55-64)	70,79	70,57
Laki-laki	85,51	86,08
Perempuan	55,55	54,72
Perkotaan	63,51	63,74
Perdesaan	78,17	77,48
65 Tahun ke atas	39,41	39,16
Laki-laki	55,67	55,03
Perempuan	26,53	26,40
Perkotaan	32,36	30,73
Perdesaan	46,04	47,10

Pada periode (Februari–Mei) 2012 persentase TPAK menurut kelompok umur secara keseluruhan mengalami penurunan terbanyak pada kelompok umur (25-34) sebesar 0,56 persen poin. Kecuali pada kelompok umur (25-54) dan (35-54) yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,45 persen poin

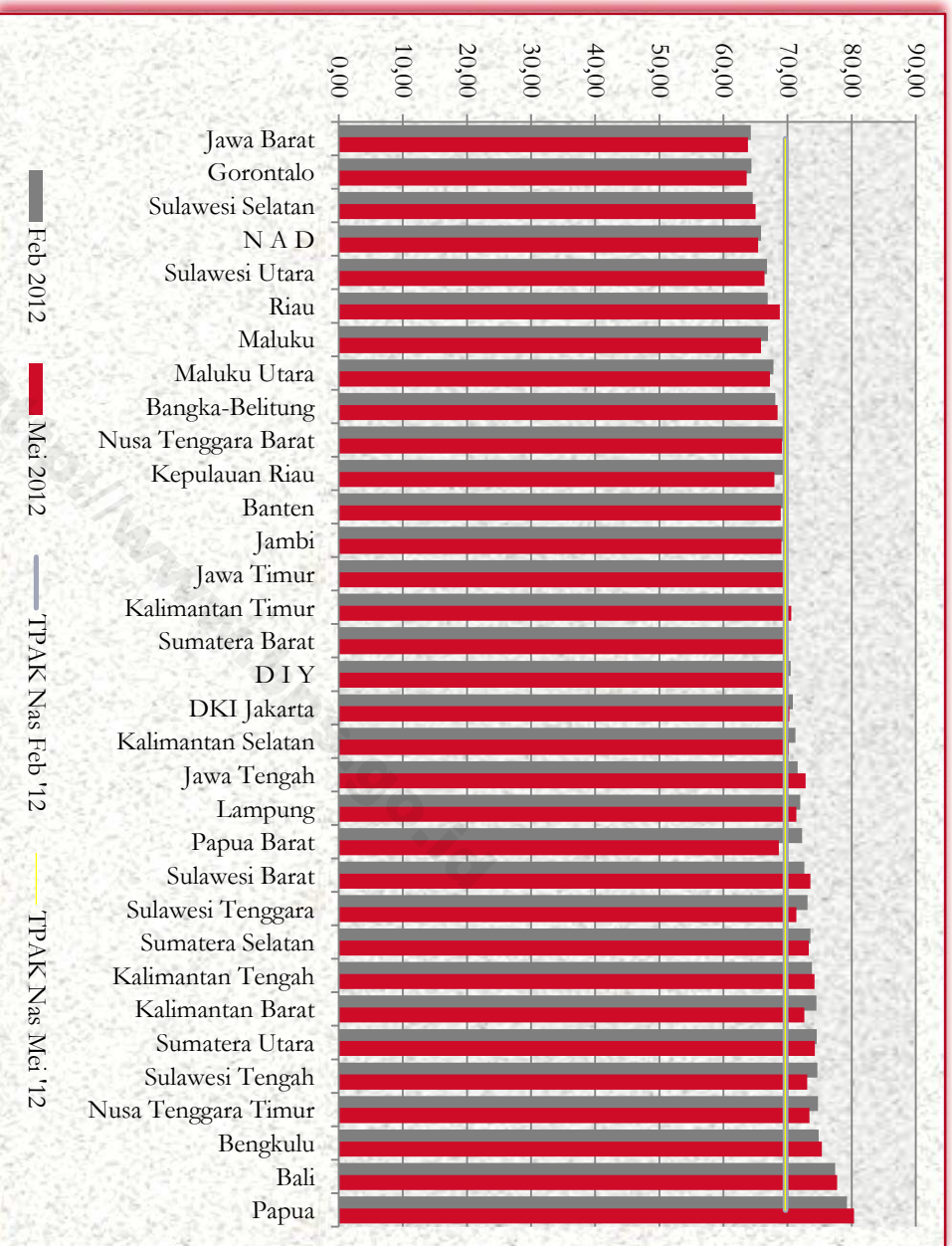
Pada Grafik 1, TPAK berdasarkan kelompok umur terlihat terjadinya pergeseran pola dengan jelas terutama TPAK pada kelompok-kelompok umur tua. Hal ini mengindikasikan adanya perpindahan penduduk dari Angkatan Kerja ke Bukan Angkatan Kerja pada kelompok umur tua. Puncak TPAK pada kelompok umur 45–49 tahun periode (Februari–Mei) 2012 terlihat tidak terjadi perubahan yang mencolok.



Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012

Adanya pergeseran TPAK menurut provinsi-provinsi di Indonesia dapat terlihat pada Grafik 2. Pada Mei 2012, provinsi-provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Papua (79,27 persen), Bali (77,42 persen) dan Bengkulu (74,85 persen), sedangkan pada Februari 2012 posisi ini secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (78,45 persen), Bali (76,45 persen), dan Kalimantan Barat (73,93 persen). Sementara itu provinsi dengan TPAK terendah pada Mei 2012 adalah Jawa Barat (64,26 persen), Gorontalo (64,36 persen), dan Maluku (64,56 persen), sedangkan pada kondisi Februari 2012 posisi terendah tetap diduduki oleh Provinsi Jawa Barat (62,27 persen),

terendah berikutnya diduduki oleh Provinsi Gorontalo (63,78 persen) dan Sulawesi Selatan (64,12 persen).



Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah).

Secara nasional, angka EPR pada Mei 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, peningkatan EPR tersebut hanya sebesar 0,11 poin dari angka 65,25 pada Februari 2012 menjadi 65,36 pada Mei 2012. Angka ini bisa diinterpretasikan dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Mei 2012.

EPR (*Employment to Population Ratio*) dilihat menurut kelompok umur secara keseluruhan mengalami peningkatan, terutama terjadi pada penduduk usia muda (kelompok umur 15-24 tahun). Peningkatan EPR pada penduduk usia muda (kelompok umur 15-24 tahun) mencapai sebesar 0,38 poin, yaitu dari angka 41,43 pada Februari 2012 menjadi 41,81 pada Mei 2012. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR pada kelompok usia muda baik untuk laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,47 poin dan 0,28 poin.

Sedangkan secara nasional berdasarkan daerah tempat tinggal (kota dan desa) pada Mei 2012 EPR mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin untuk daerah perdesaan dan turun sebesar 0,07 poin untuk daerah perkotaan dibandingkan kondisi Februari 2012.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012
(dalam juta)

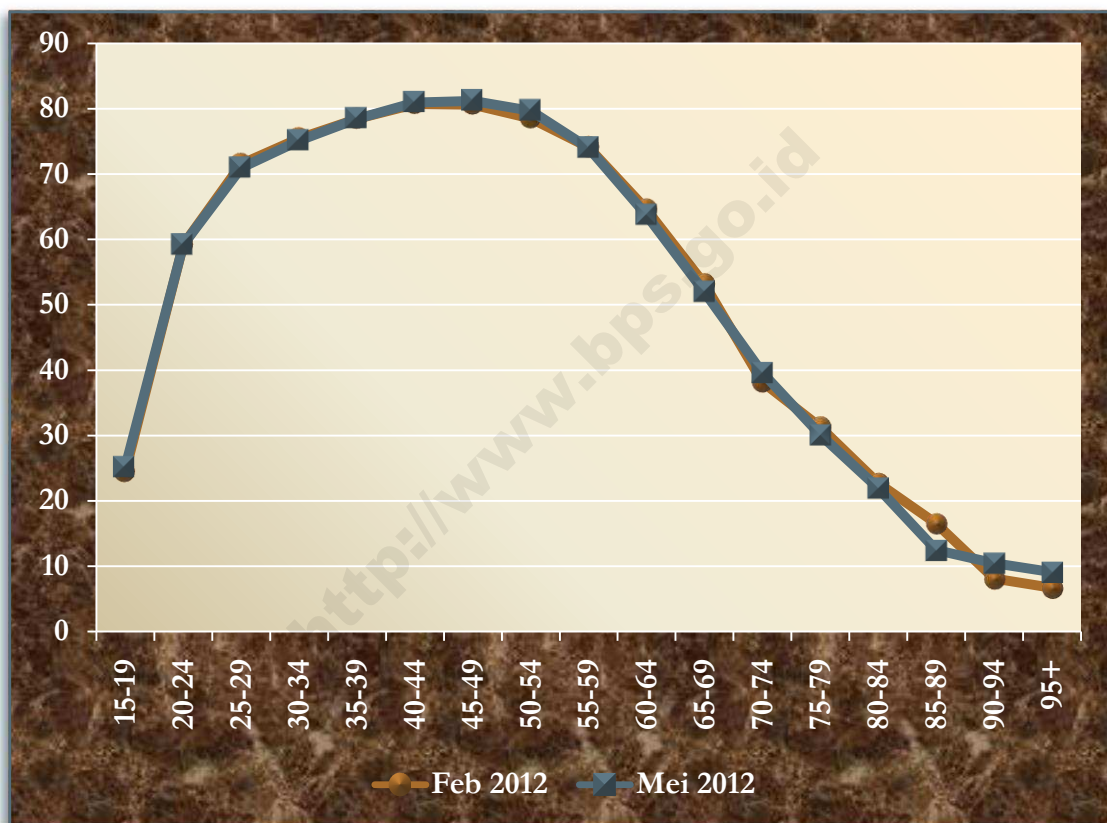
Indikator	Februari	Mei
Usia 15 Tahun ke Atas	172,87	173,42
Laki-laki	86,27	86,55
Perempuan	86,59	86,87
Perkotaan	86,75	87,03
Perdesaan	86,12	86,39
Usia Muda (15-24)	41,74	41,88
Laki-laki	20,99	21,06
Perempuan	20,75	20,82
Perkotaan	20,86	20,93
Perdesaan	20,88	20,95
Usia Dewasa (25+)	131,12	131,54
Laki-laki	65,28	65,49
Perempuan	65,84	66,05
Perkotaan	65,89	66,10
Perdesaan	65,23	65,44
Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja	112,80	113,35
Laki-laki	69,48	70,05
Perempuan	43,32	43,30
Perkotaan	54,02	54,14
Perdesaan	58,78	59,21
Usia Muda (15-24) yang Bekerja	17,30	17,51
Laki-laki	10,55	10,68
Perempuan	6,75	6,83
Perkotaan	8,14	8,22
Perdesaan	9,15	9,30
Usia Dewasa (25+) yang Bekerja	95,51	95,83
Laki-laki	58,93	59,36
Perempuan	36,58	36,47
Perkotaan	45,88	45,92
Perdesaan	49,63	49,91

Tabel 3. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Total	65,25	65,36
Laki-laki	80,54	80,93
Perempuan	50,03	49,84
Perkotaan	62,27	62,20
Perdesaan	68,26	68,54
Usia Muda (15-24)	41,43	41,81
Laki-laki	50,24	50,71
Perempuan	32,52	32,80
Perkotaan	39,02	39,25
Perdesaan	43,84	44,37
Usia Dewasa (25+)	72,84	72,86
Laki-laki	90,28	90,65
Perempuan	55,55	55,21
Perkotaan	69,63	69,47
Perdesaan	76,08	76,28

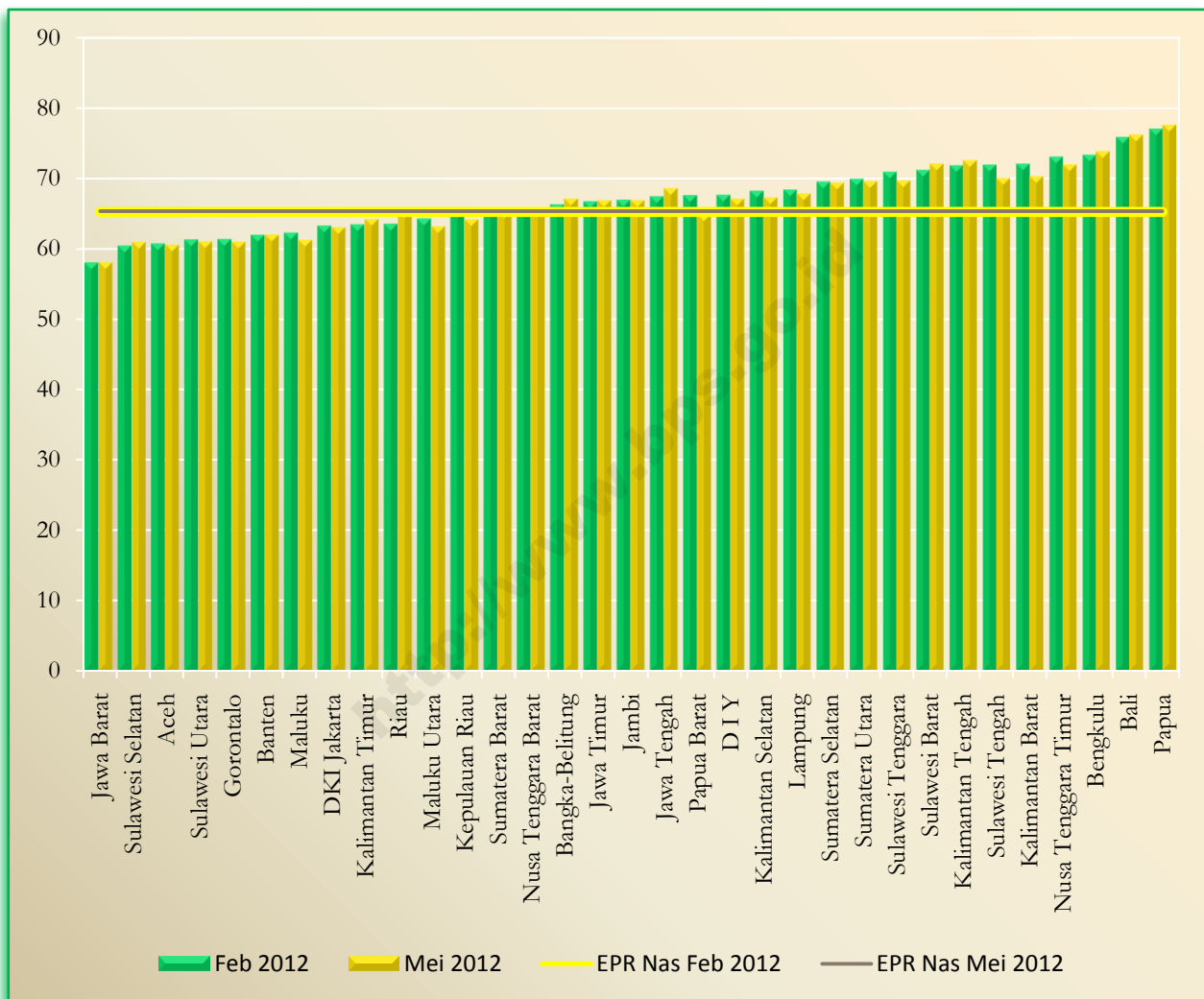
Begitu pula penduduk kelompok dewasa (usia 25 tahun ke atas) pada Mei 2012 EPR mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin, yaitu dari angka 72,84 pada Februari 2012 naik menjadi 72,86 pada Mei 2012. Namun bila dilihat EPR berdasarkan jenis kelamin pada Mei 2012 penduduk berjenis kelamin laki-laki meningkat sebesar 0,37 poin, sedangkan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,34 poin dibandingkan kondisi Februari 2012. Sama halnya bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal pada Mei 2012, EPR penduduk usia dewasa di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,16 poin, dan di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin bila dibandingkan pada kondisi Februari 2012.

Pola EPR berdasarkan kelompok umur seperti terlihat pada grafik 3, ternyata mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen angkatan kerja. Artinya, komponen pengangguran pada angkatan kerja relatif kecil. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun. Terlihat juga bahwa antara Mei 2012 dan Februari 2012 grafik EPR berhimpitan hingga kelompok umur 45-49, dan mulai merenggang pada kelompok umur 50-54, dengan jarak terbesar terjadi pada kelompok umur 80-84.



Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012

Pergeseran EPR menurut provinsi di Indonesia pada kondisi (Februari dan Mei) 2012 tidak mengalami perubahan yang nyata terlihat pada Grafik 4, provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi adalah provinsi Papua, Bali dan tertinggi berikutnya provinsi Bengkulu. Sementara itu provinsi dengan EPR terendah pada periode Februari–Mei 2012 adalah provinsi Jawa Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terendah berikutnya Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah dan gaji;
- 2) Penduduk bekerja dengan status berusaha/wiraswasta; dan
- 3) Pekerja keluarga; yang masing-masing dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja.

Di samping itu disajikan juga rasio pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian maupun nonpertanian, serta pekerja keluarga/tak dibayar.

Selama Februari 2012 sampai Mei 2012 terjadi kenaikan persentase penduduk yang bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai), yaitu dari sebesar 33,81 persen pada Februari 2012, meningkat menjadi 34,05 persen pada Mei 2012 berarti ada peningkatan sebesar 0,24 persen. Pola sebaliknya terjadi pada pekerja keluarga yaitu dari 17,29 persen pada Februari 2012, menurun menjadi 16,71 persen pada Mei 2012 terjadi penurunan sebesar 0,58 persen. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, proporsi pekerja keluarga pada perempuan sebesar 31,96 persen jauh lebih tinggi dibanding proporsi pekerja keluarga pada laki-laki yang hanya 7,28 persen.

Sementara itu, secara nasional pada Mei 2012, proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment* " mencapai 62,04 persen, yang berarti dari 100 orang pekerja yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 62 orang. Namun bila dilihat berdasarkan jenis kelamin proporsi penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 66,70 persen jauh lebih tinggi dibandingkan secara nasional, yang berarti dari 100 orang pekerja perempuan yang termasuk kategori pekerja rentan sekitar 66 orang.

Tabel 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012
(dalam juta)

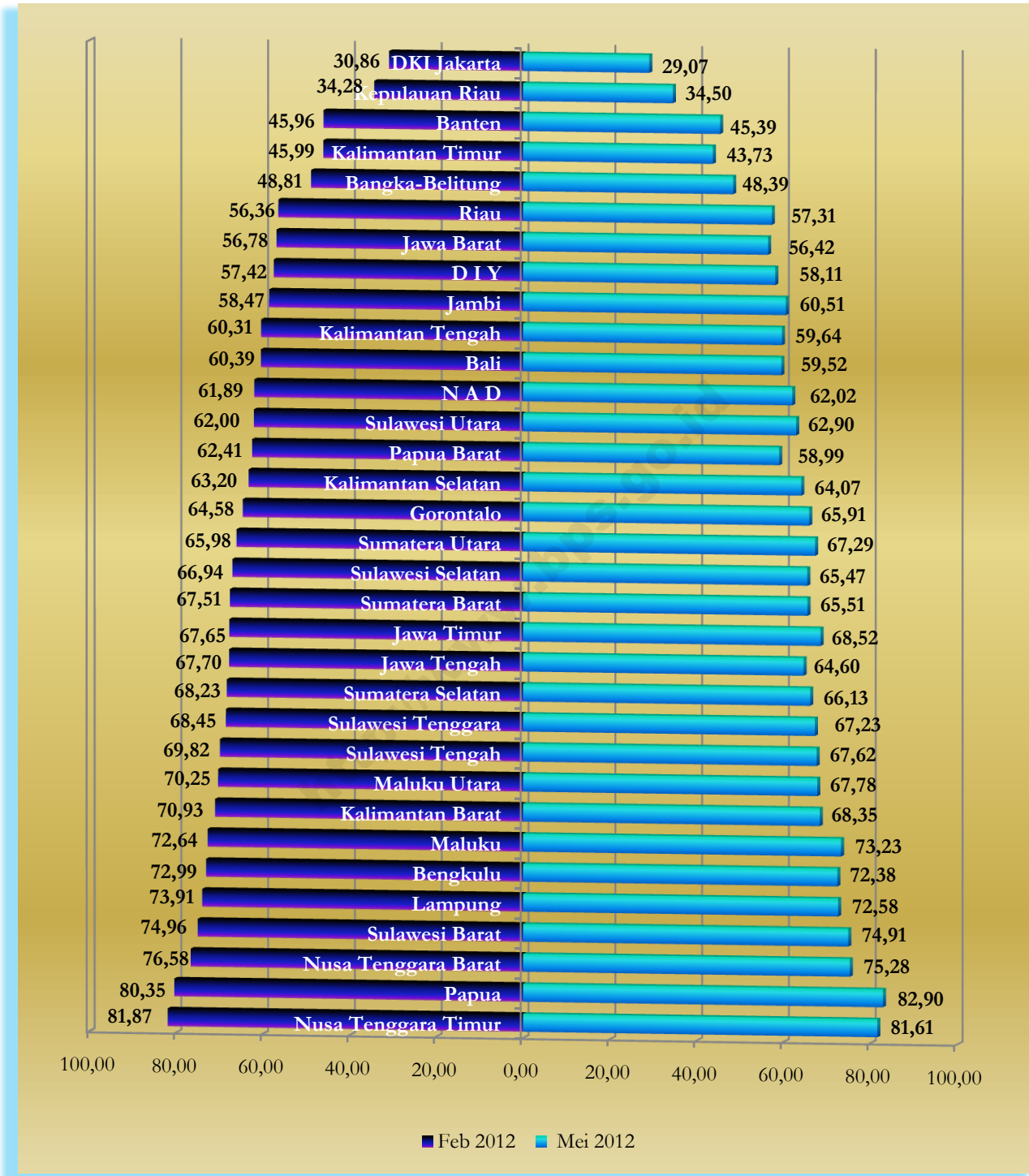
Indikator	Februari	Mei
Laki dan Perempuan	112,80	113,35
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,14	38,60
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	55,17	55,81
i. Pengusaha	3,93	4,42
ii. Berusaha sendiri	39,91	39,45
iii. Pekerja bebas	11,33	11,94
c. Pekerja keluarga	19,50	18,94
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	70,74	70,33
Laki-laki	69,48	70,05
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	24,77	25,08
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	39,52	39,87
i. Pengusaha	3,14	3,52
ii. Berusaha sendiri	27,93	27,36
iii. Pekerja bebas	8,44	8,99
c. Pekerja keluarga	5,19	5,10
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	41,57	41,45
Perempuan	43,32	43,30
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	13,37	13,52
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	15,65	15,94
i. Pengusaha	0,79	0,90
ii. Berusaha sendiri	11,98	12,09
iii. Pekerja bebas	2,88	2,95
c. Pekerja keluarga	14,31	13,84
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	29,17	28,88

Tabel 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Laki dan Perempuan	100,00	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,81	34,05
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	48,91	49,24
i. Pengusaha	3,48	3,90
ii. Berusaha sendiri	35,38	34,81
iii. Pekerja bebas	10,04	10,53
c. Pekerja keluarga	17,29	16,71
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	62,71	62,05
Laki-laki	100,00	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	35,65	35,80
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	56,88	56,92
i. Pengusaha	4,52	5,03
ii. Berusaha sendiri	40,20	39,06
iii. Pekerja bebas	12,15	12,83
c. Pekerja keluarga	7,47	7,28
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	59,83	59,17
Perempuan	100,00	100,00
a. Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	30,85	31,23
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	36,12	36,81
i. Pengusaha	1,82	2,07
ii. Berusaha sendiri	27,65	27,93
iii. Pekerja bebas	6,65	6,81
c. Pekerja keluarga	33,03	31,96
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	67,33	66,70

Menurut provinsi yang ada di Indonesia proporsi pekerja rentan tidak mengalami perubahan yang berarti ditunjukkan pada Grafik 5, pada keadaan Mei 2012 yang tertinggi adalah Provinsi Papua (82,90 persen), disusul oleh provinsi Nusa Tenggara Timur (81,61 persen) dan provinsi Nusa Tenggara Barat (75,28 persen). Sementara itu proporsi pekerja rentan yang terendah adalah Provinsi DKI Jakarta (29,07 persen), kemudian posisi kedua ditempati Provinsi

Kepulauan Riau (34,50 persen) dan urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Kalimantan Timur (43,73 persen) pada kondisi Mei 2012.



Grafik 5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu *A(griculture)*/Pertanian, *M(anufacture)*/Manufaktur, dan *S(ervices)*/Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revision 2 and Revision 3)*.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2012 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia untuk Sektor Manufaktur dan Sektor Pertanian digeser oleh Sektor Jasa-Jasa. Hal ini ditunjukkan secara sektoral oleh proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Jasa-Jasa sebesar 43,41 persen sedangkan Sektor Pertanian mencapai 36,55 persen dan Sektor Manufaktur hanya sebesar 20,04 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di Sektor Jasa-jasa, selain ditunjang oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Transportasi. Sedangkan persentase Sektor Industri dan Bangunan menjadi penyumbang terbesar pada Sektor Manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,68 persen dan 5,62 persen.

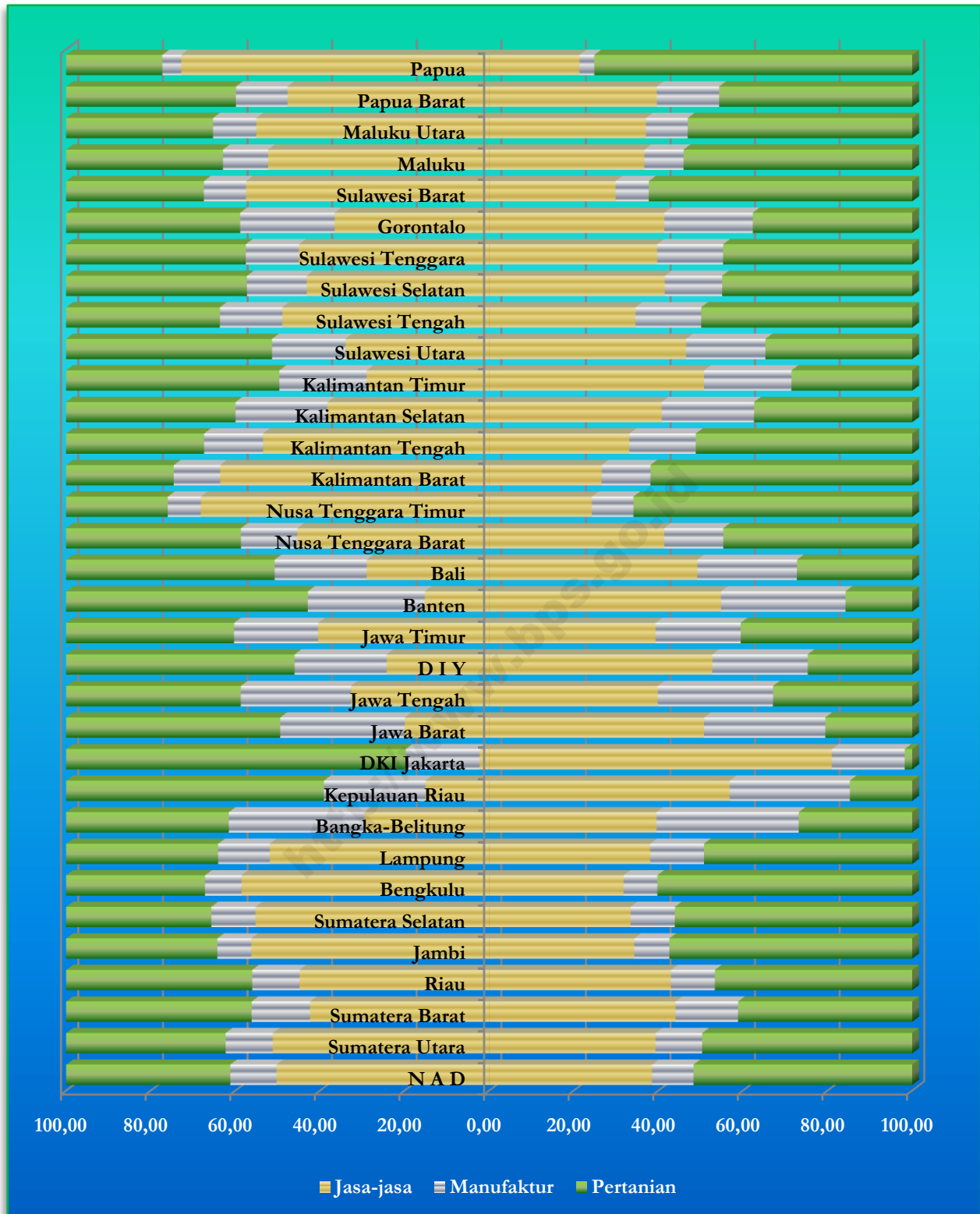
Komposisi sektoral hasil Sakernas Mei 2012 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan keadaan Februari 2012, dengan komposisi Sektor Manufaktur dan Sektor Pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,33 persen dan sebesar 0,02 persen, kecuali pada Sektor Jasa-Jasa yang mengalami penurunan sebesar 0,35 persen walaupun secara nasional merupakan sektor yang mendominasi. Penurunan pada sektor ini didukung oleh penurunan yang terjadi pada komponen Sektor Jasa-Jasa, yaitu Sektor Jasa Kemasyarakatan yang turun sebesar 0,23 persen, Sektor Perdagangan turun sebesar 0,15 persen, dan Sektor Transportasi yang turun sebesar 0,07 persen. Kemungkinan hal ini terjadi disebabkan oleh beralihnya mereka bekerja Sektor Manufaktur dan Sektor Pertanian.

Tabel 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012
(dalam juta)

Indikator	Februari	Mei
Total	112,80	113,35
a. Pertanian	41,21	41,43
b. Manufaktur	22,23	22,71
i. Pertambangan	1,62	1,71
ii. Industri	14,21	14,37
iii. Listrik, gas dan air	0,30	0,27
iv. Bangunan	6,10	6,37
c. Jasa-jasa	49,36	49,20
i. Perdagangan	24,02	23,96
ii. Transportasi	5,19	5,14
iii. Keuangan	2,78	2,91
iv. Jasa kemasyarakatan	17,37	17,20
Laki-laki	69,48	70,05
a. Pertanian	25,67	25,88
b. Manufaktur	16,12	16,52
i. Pertambangan	1,43	1,52
ii. Industri	8,46	8,52
iii. Listrik, gas dan air	0,25	0,24
iv. Bangunan	5,97	6,24
c. Jasa-jasa	27,70	27,65
i. Perdagangan	11,70	11,56
ii. Transportasi	4,89	4,85
iii. Keuangan	1,97	2,15
iv. Jasa kemasyarakatan	9,14	9,08
Perempuan	43,32	43,30
a. Pertanian	15,54	15,55
b. Manufaktur	6,12	6,19
i. Pertambangan	0,19	0,19
ii. Industri	5,75	5,85
iii. Listrik, gas dan air	0,05	0,03
iv. Bangunan	0,13	0,13
c. Jasa-jasa	21,67	21,55
i. Perdagangan	12,32	12,40
ii. Transportasi	0,30	0,28
iii. Keuangan	0,81	0,76
iv. Jasa kemasyarakatan	8,24	8,12

Tabel 7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Laki dan Perempuan	100,00	100,00
a. Pertanian	36,53	36,55
b. Manufaktur	19,71	20,04
i. Pertambangan	1,44	1,51
ii. Industri	12,60	12,68
iii. Listrik, gas dan air	0,26	0,24
iv. Bangunan	5,41	5,62
c. Jasa-jasa	43,76	43,41
i. Perdagangan	21,29	21,14
ii. Transportasi	4,60	4,53
iii. Keuangan	2,46	2,57
iv. Jasa kemasyarakatan	15,40	15,17
Laki-laki	100,00	100,00
a. Pertanian	36,94	36,95
b. Manufaktur	23,19	23,59
i. Pertambangan	2,06	2,17
ii. Industri	12,17	12,17
iii. Listrik, gas dan air	0,36	0,35
iv. Bangunan	8,60	8,91
c. Jasa-jasa	39,86	39,47
i. Perdagangan	16,84	16,50
ii. Transportasi	7,04	6,93
iii. Keuangan	2,83	3,07
iv. Jasa kemasyarakatan	13,15	12,96
Perempuan	100,00	100,00
a. Pertanian	35,86	35,92
b. Manufaktur	14,12	14,30
i. Pertambangan	0,43	0,44
ii. Industri	13,28	13,51
iii. Listrik, gas dan air	0,11	0,06
iv. Bangunan	0,30	0,29
c. Jasa-jasa	50,02	49,78
i. Perdagangan	28,43	28,63
ii. Transportasi	0,70	0,65
iii. Keuangan	1,87	1,75
iv. Jasa kemasyarakatan	19,01	18,75



Grafik 6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012

4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai proporsi dari total penduduk bekerja.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2012 sebesar 18,33 persen atau sedikit naik sebesar 0,36 persen poin sehingga pada Mei 2012 menjadi 18,69 persen. Tingkat pekerja paruh waktu pada Mei 2012 yang mencapai 18,69 persen dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 19 orang pekerja paruh waktu. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,93 persen. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 57,24 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sejumlah 57 orang adalah perempuan.

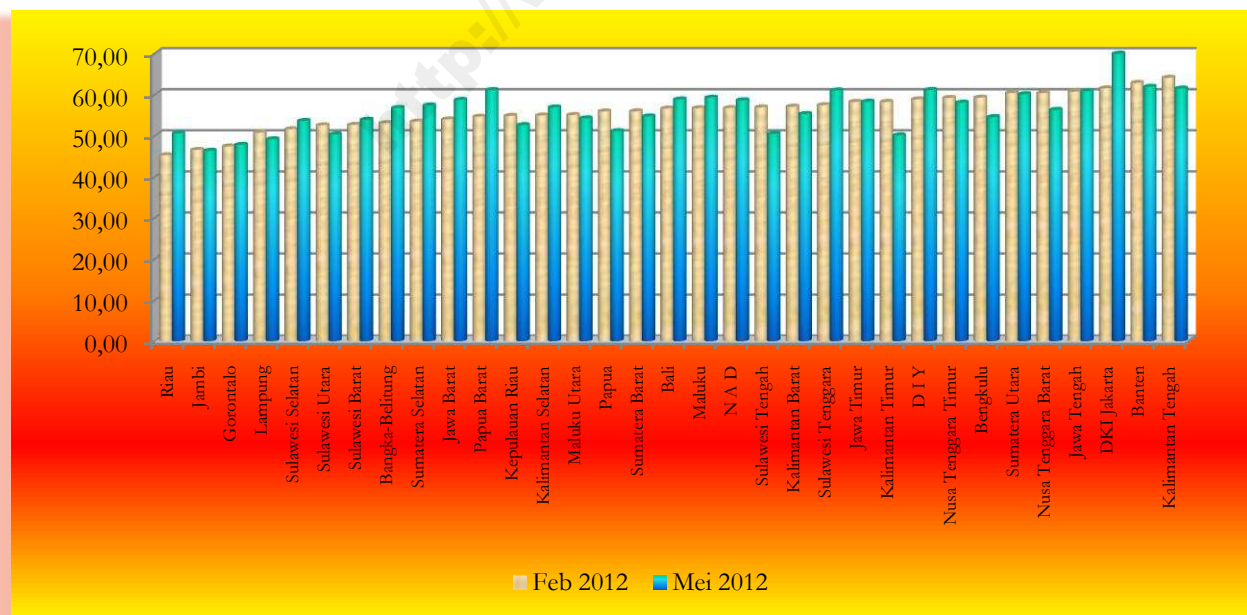
Hasil Sakernas Mei 2012 menunjukkan kenaikan tingkat pekerja paruh waktu nasional juga diikuti dengan kenaikan tingkat pekerja paruh waktu baik untuk laki-laki (dari 12,88 persen pada Februari 2012 menjadi 12,93 persen pada Mei 2012) maupun perempuan (dari 27,08 persen pada Februari 2012 menjadi 28,01 persen pada Mei 2012). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, kenaikan persentase pekerja paruh waktu terjadi di daerah perdesaan (dari 23,38 persen pada Februari 2012 menjadi 24,39 persen pada Mei 2012), sedangkan di daerah perkotaan mengalami penurunan (dari 12,84 persen pada Februari 2012 menjadi 12,46 persen pada Mei 2012). Sementara itu *share* perempuan pada pekerja paruh waktu masih relatif tetap selama Februari 2012-Mei 2012 yaitu sebesar 56,73 persen pada Februari 2012 menjadi 57,24 persen pada Mei 2012, dalam hal ini dapat diartikan bahwa selama periode satu triwulan terakhir dari 100 pekerja paruh waktu, sejumlah sekitar 57 orang adalah perempuan. Akan tetapi, peningkatan ini juga mungkin disebabkan oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja, bukan semata-mata lebih panjangnya jam kerja perempuan.

Sementara itu pada Mei 2012, beberapa provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi berturut-turut diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (69,98 persen), Banten

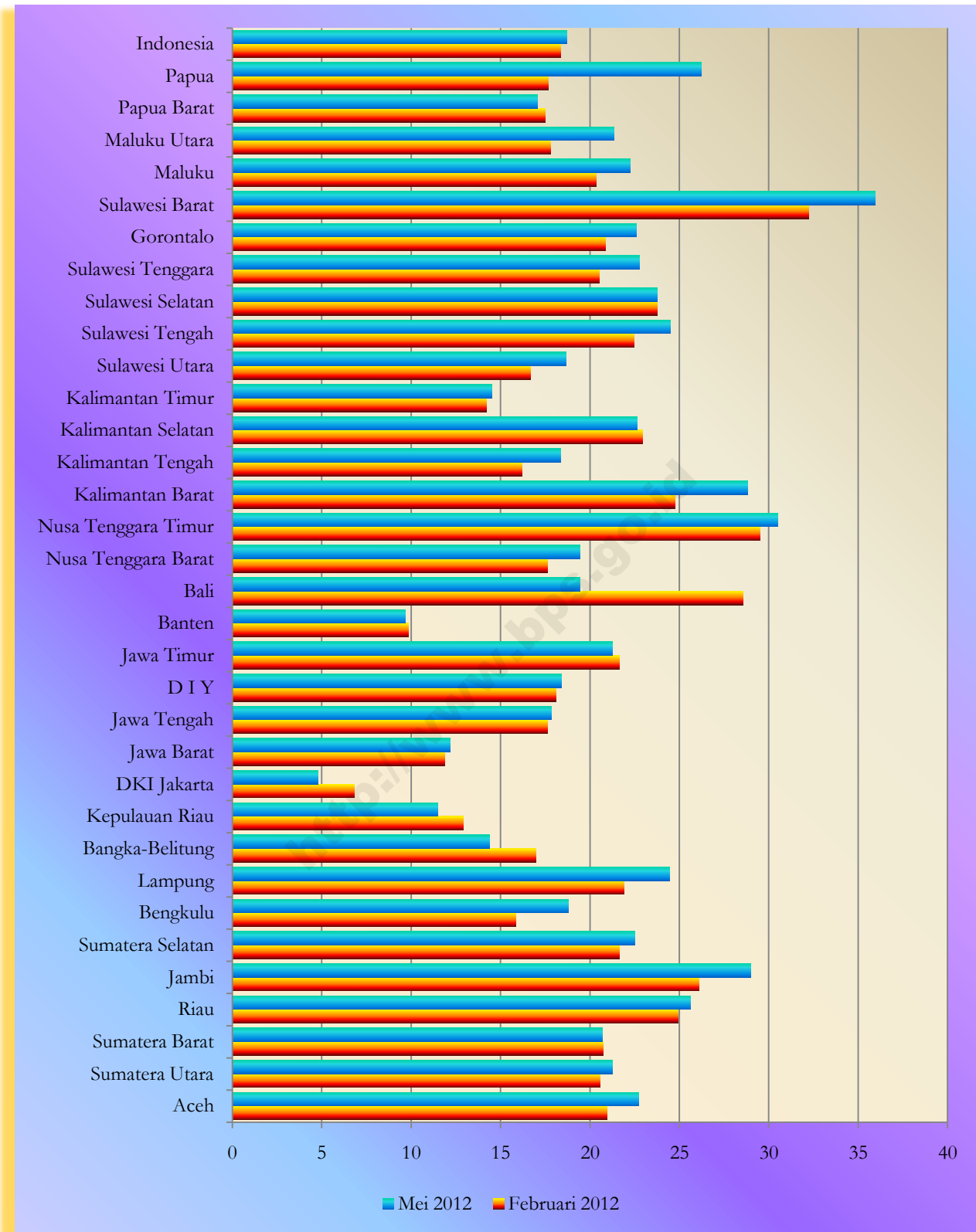
(61,94 persen), dan Provinsi Kalimantan Tengah (61,50 persen). Sebaliknya *share* perempuan pada pekerja paruh waktu terendah diduduki oleh Provinsi Jambi (46,36 persen), Provinsi Gorontalo (47,80 persen), dan Provinsi Lampung (49,16 persen). Pada periode yang sama Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jambi adalah provinsi yang memiliki tingkat pekerja paruh waktu tertinggi, masing masing sebesar 35,96 persen, 30,51 persen, 28,99 persen. Sementara tiga posisi terendah untuk tingkat pekerja paruh waktu diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (4,79 persen), Provinsi Banten (9,65 persen), dan Provinsi Kepulauan Riau (11,46 persen).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, Februari dan Mei 2012
(Persen)

Indikator	Februari	Mei
Tingkat Pekerja Paruh Waktu	18,33	18,69
a. Laki-laki	12,88	12,93
b. Perempuan	27,08	28,01
c. Perkotaan	12,84	12,46
d. Perdesaan	23,38	24,39
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	56,73	57,24



Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JAM KERJA

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam ke atas, 50 jam ke atas, dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

Hasil Sakernas selama Februari 2012 hingga Mei 2012 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu yakni lebih dari dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Pada Mei 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja di bawah 35 jam perminggu jika dibandingkan Februari 2012 yaitu dari 33,44 persen pada Februari 2012 menjadi 32,73 persen pada Mei 2012.

Selama kurun waktu satu triwulan terakhir (Februari 2012-Mei 2012) menunjukkan bahwa penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih tinggi dibanding kelompok laki-laki serta terlihat pada hampir setiap pengelompokan untuk jumlah jam kerja 35 jam perminggu ke bawah. Sebagai gambaran pada Mei 2012, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya selama seminggu 1-14 jam sebesar 9,44 persen sementara persentase pekerja laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 3,49 persen.

Penurunan komposisi penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu) terjadi baik di daerah perkotaan (dari 23,42 persen pada Februari 2012 menjadi 21,92 persen pada Mei 2012) maupun di daerah perdesaan (dari 42,65 persen pada Februari 2012 menjadi 42,61 persen pada Mei 2012).

Secara keseluruhan persentase penduduk bekerja berdasarkan jam kerja tertinggi pada kelompok jam kerja 40-48 jam perminggu. Pada Februari 2012 persentase penduduk yang bekerja selama 40-48 jam seminggu adalah 29,40 persen, meningkat menjadi 30,04 persen pada Mei 2012. Sementara penurunan persentase penduduk yang bekerja melebihi jam kerja 48 jam perminggu hanya terjadi pada kelompok penduduk yang bekerja selama 60 jam ke atas yang pada Februari 2012 mencapai 11,72 persen lalu turun pada Mei 2012 menjadi 11,53.

Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Total	100,00	100,00
a. 0 jam*	1,93	1,58
b. 1 - 14 jam	6,08	5,76
c. 15 - 24 jam	11,23	11,42
d. 25 - 34 jam	14,21	13,96
e. 35 - 39 jam	10,45	10,46
f. 40 - 48 jam	29,40	30,04
g. 49 - 59 jam	14,98	15,24
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	11,72	11,53
Laki-Laki	100,00	100,00
a. 0 jam*	1,99	1,63
b. 1 - 14 jam	3,78	3,49
c. 15 - 24 jam	8,23	8,34
d. 25 - 34 jam	12,48	12,21
e. 35 - 39 jam	10,01	10,02
f. 40 - 48 jam	33,77	34,53
g. 49 - 59 jam	17,65	17,83
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	12,09	11,94
Perempuan	100,00	100,00
a. 0 jam*	1,83	1,50
b. 1 - 14 jam	9,75	9,44
c. 15 - 24 jam	16,05	16,41
d. 25 - 34 jam	16,98	16,79
e. 35 - 39 jam	11,15	11,18
f. 40 - 48 jam	22,39	22,77
g. 49 - 59 jam	10,70	11,06
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	11,14	10,86

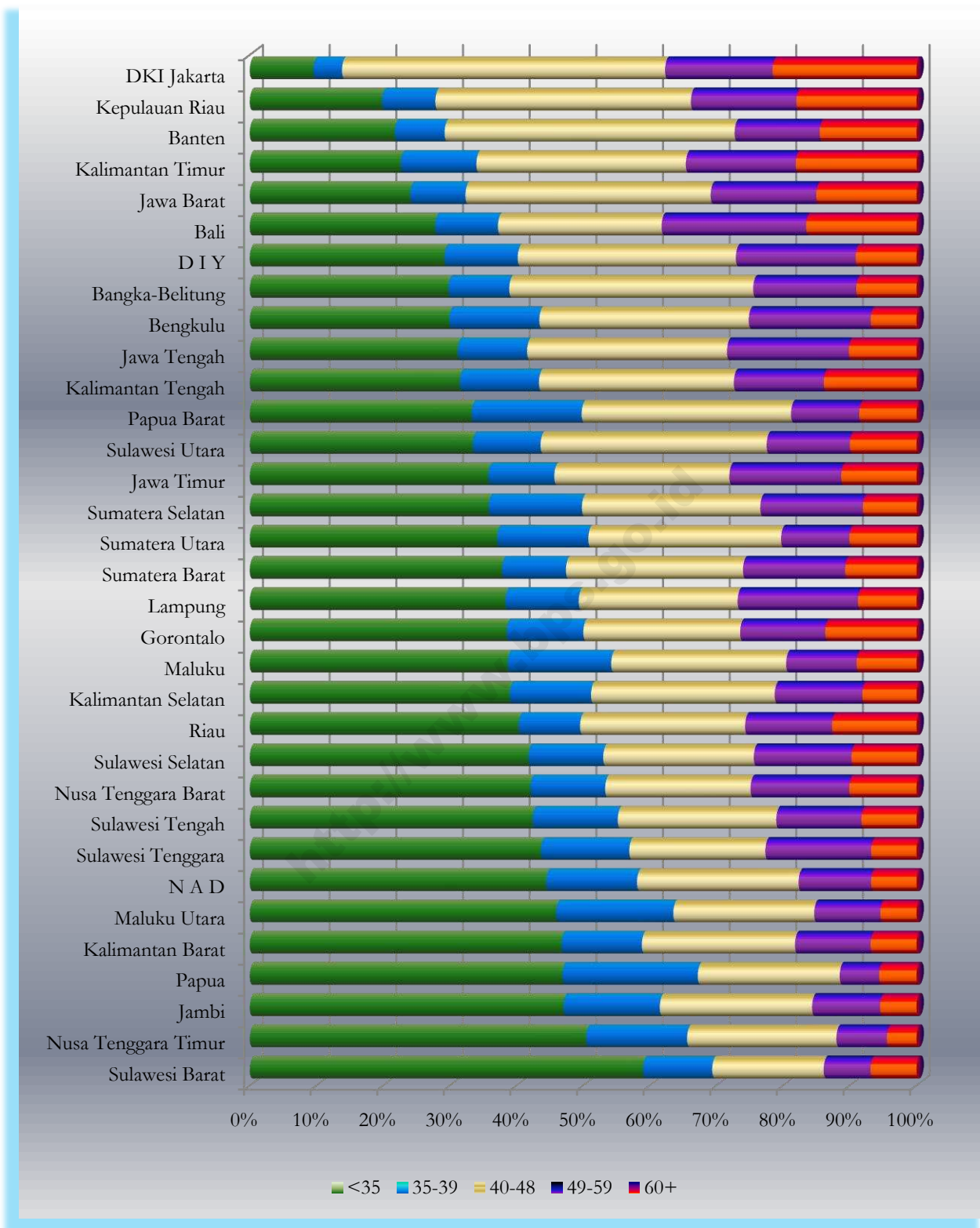
*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012
(Lanjutan)

Indikator	Februari	Mei
Perkotaan	100,00	100,00
a. 0 jam*	1,91	1,58
b. 1 - 14 jam	4,15	5,76
c. 15 - 24 jam	7,21	11,42
d. 25 - 34 jam	10,16	13,96
e. 35 - 39 jam	8,86	10,46
f. 40 - 48 jam	35,99	30,04
g. 49 - 59 jam	16,17	15,24
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	15,57	11,53
Perdesaan	100,00	100,00
a. 0 jam*	1,94	1,47
b. 1 - 14 jam	7,85	3,70
c. 15 - 24 jam	14,93	7,23
d. 25 - 34 jam	17,93	9,51
e. 35 - 39 jam	11,91	8,98
f. 40 - 48 jam	23,35	36,81
g. 49 - 59 jam	13,90	16,55
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	8,19	15,74

**0 jam: Sementara tidak bekerja*

Berikutnya, tiga provinsi dengan proporsi penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam perminggu terbanyak berdasarkan Sakernas Mei 2012 yaitu Provinsi Sulawesi Barat (59,00 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (50,47 persen), dan Provinsi Jambi (47,07 persen). Sebaliknya tiga provinsi dengan proporsi penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu paling kecil yaitu DKI Jakarta (4,79 persen), Provinsi Kepulauan Riau (19,85 persen) dan Provinsi Banten (21,76 persen).



Grafik 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jam Kerja, Mei 2012

4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama atau sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Mei 2012, dari sejumlah 113,35 juta orang yang bekerja, 55,05 persennya merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (62,39 juta orang). Dibandingkan keadaan Februari 2012, proporsi penduduk yang bekerja di sektor ini mengalami penurunan yang tentunya diikuti dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Februari 2012 sebesar 55,84 persen yang turun sebesar 0,79 persen poin pada Mei 2012 ini menjadi 55,05 persen. Sementara sektor formal pada Februari 2012 mencapai 44,16 persen dan pada Mei 2012 naik menjadi 44,95 persen.

Ditinjau berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum pria, dimana hampir sekitar dua pertiga dari keseluruhan pekerjaan di sektor formal dipegang oleh laki-laki. Pada Februari dan Mei 2012 persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal masing-masing adalah 64,82 persen dan 64,93 persen atau relatif tetap pada angka tersebut dengan kenaikan sangat tipis dalam periode satu triwulan. Sementara itu proporsi penduduk perempuan yang bekerja pada sektor informal lebih tinggi daripada sektor formal dengan kecenderungan menurun selama periode satu triwulan (Februari 2012-Mei 2012).

Tabel 10. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012
(dalam juta)

Indikator	Februari	Mei
Total	112,80	113,35
a. Laki	69,48	70,05
b. Perempuan	43,32	43,30
c. Perkotaan	54,02	54,14
d. Perdesaan	58,78	59,21
Formal	49,81	50,95
a. Laki	32,29	33,08
b. Perempuan	17,52	17,87
c. Perkotaan	33,28	33,70
d. Perdesaan	16,53	17,25
Informal	62,99	62,39
a. Laki	37,19	36,97
b. Perempuan	25,80	25,43
c. Perkotaan	20,73	20,43
d. Perdesaan	42,26	41,96

Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012

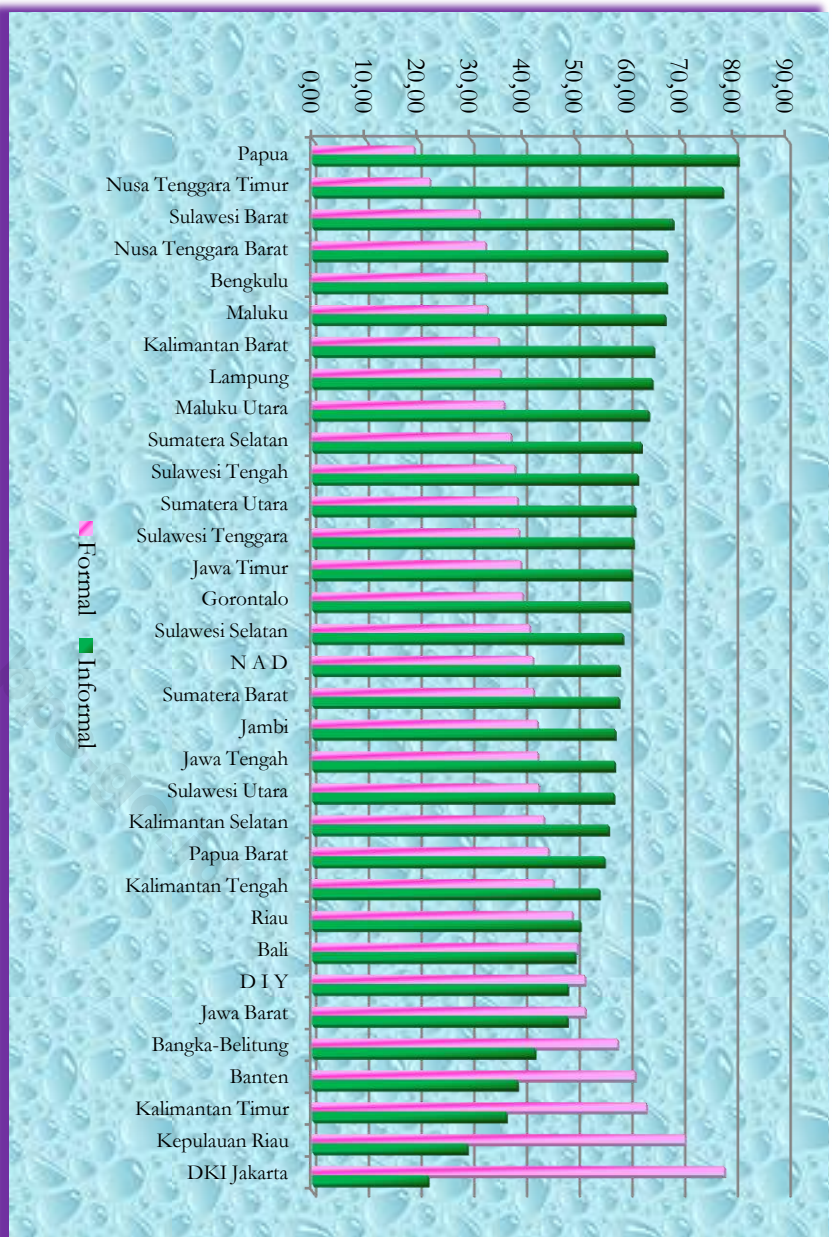
Indikator	2012	
	Februari	Mei
Total Formal+Informal	100,00	100,00
a. Formal	44,16	44,95
b. Informal	55,84	55,05
Formal	100,00	100,00
a. Laki	64,82	64,93
b. Perempuan	35,18	35,07
c. Perkotaan	66,82	66,15
d. Perdesaan	33,18	33,85
Informal	100,00	100,00
a. Laki	59,04	59,25
b. Perempuan	40,96	40,75
c. Perkotaan	32,92	32,75
d. Perdesaan	67,08	67,25

Salah satu ciri khas sektor formal, yaitu sektor yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan, hal ini terbukti dari hasil Sakernas seperti yang tampak pada Tabel 11. Hasil Sakernas Mei 2012 menunjukkan bahwa 66,15 persen penduduk di perkotaan bekerja di sektor formal atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,67 persen poin dibanding satu periode triwulan sebelumnya pada Februari 2012. Sebaliknya, kondisi di perdesaan jumlah penduduk bekerja pada sektor informal lebih mendominasi dengan kenaikan tipis sebesar 0,17 persen poin dalam kurun waktu periode yang sama (Februari 2012-Mei 2012).

Sementara itu proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal sebagian berada di wilayah barat Indonesia. Diantaranya tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja di sektor formal dengan posisi tertinggi diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta (78,13 persen), Kepulauan Riau (70,66 persen), dan Kalimantan Timur (63,31 persen). Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal tertinggi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (80,75 persen), Nusa Tenggara Timur (77,75 persen), dan Sulawesi Barat (68,36 persen).



Grafik 10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012



Grafik 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor (Formal/Informal) dan Provinsi, Mei 2012

<http://www.bps.go.id>

5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Konsep ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara TPT dengan kesulitan ekonomi (baca:kemiskinan) seringkali ada.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan (*excess supply*). Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu, ditentukan oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan atau lapangan usaha, juga berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan.

Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (pada suatu negara atau suatu kelompok penduduk tertentu yang bekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pembagi sebagai dasar statistik ini merupakan tenaga kerja atau bagian penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

Selama periode Februari 2012 sampai Mei 2012 TPT di Indonesia mengalami penurunan. TPT pada Februari 2012 sebesar 6,32 persen, turun menjadi 6,09 persen pada Mei 2012. Angka 6,09 persen tersebut mempunyai arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia ada sekitar 6 orang yang masuk kategori penganggur.

Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka, Februari dan Mei 2012
(Persen)

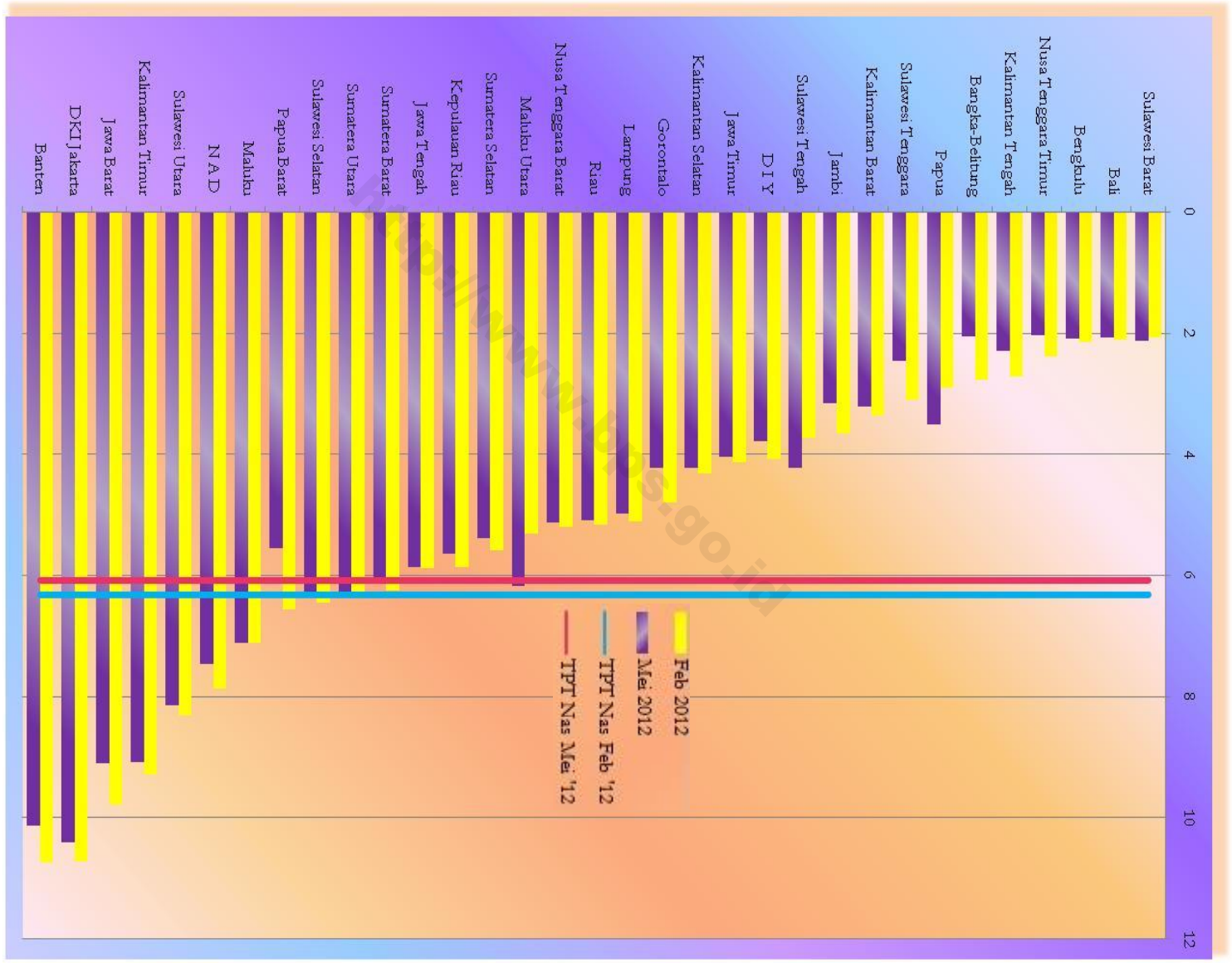
Indikator	Februari	Mei
TPT Nasional	6,32	6,09
a. Laki	5,99	5,82
b. Perempuan	6,85	6,54
c. Perkotaan	8,13	7,76
d. Perdesaan	4,59	4,52

Jika dibandingkan dengan Februari 2012 tingkat pengangguran pada Mei 2012 berdasarkan jenis kelamin mengalami penurunan ini lebih terlihat pada perempuan, TPT perempuan mengalami penurunan 0,31 persen poin lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya turun sebesar 0,17 persen poin. Begitu pula Berdasarkan klasifikasi desa-kota pada periode yang sama, baik tingkat pengangguran di daerah perkotaan maupun perdesaan TPT cenderung mengalami penurunan. Selama periode ini penurunan TPT di daerah perdesaan

sedikit lebih tinggi dibanding perkotaan, masing-masing sebesar 0,37 persen poin dan 0,07 persen poin.

Pada Februari dan Mei 2012 posisi tiga provinsi dengan TPT tertinggi tidak mengalami perubahan, yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar (10,41. persen), disusul oleh Provinsi Banten sebesar (10,14 persen), selanjutnya Provinsi Jawa Barat sebesar (9,10.persen). Sementara itu provinsi dengan TPT terendah pada Mei 2012 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar (2,04 persen), disusul Provinsi Bangka Belitung sebesar (2,06 persen), kemudian Provinsi Bali sebesar (2,08 persen). Berbeda halnya pada Februari 2012 provinsi dengan TPT terendah adalah Sulawesi Barat sebesar (2,07 persen), disusul Provinsi Bali sebesar (2,11 persen), kemudian Provinsi Bengkulu sebesar (2,14 persen) dapat terlihat pada Grafik 12.

<http://www.bps.go.id>



Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK USIA MUDA

Penganggur pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "usia muda" mencakup orang yang berusia 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Sakernas Februari 2012 menghasilkan angka TPT usia muda sebesar 19,08 atau turun sebesar 1,15 persen poin pada Mei 2012 menjadi 17,93 persen. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, baik TPT usia muda laki-laki maupun perempuan cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu Februari-Mei 2012, di mana penurunan TPT usia muda pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yang masing-masing turun sebesar 2,73 persen poin dan 0,19 persen poin. Apabila dilihat dari perbedaan wilayah, TPT usia muda di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 2,29 persen poin, sementara di daerah perdesaan mengalami kenaikan sangat tipis yaitu sebesar 0,03 persen poin.

Pada Mei 2012 ini seiring menurunnya TPT usia muda, rasio TPT usia muda terhadap TPT penduduk dewasa juga menurun sebesar 0,30 poin dari Februari 2012 sebesar 5,35 menjadi sebesar 5,05 pada Mei 2012. Ditinjau dari jenis kelamin, penurunan rasio yang tipis hanya terjadi pada kelompok perempuan sebesar 0,85 poin, sedangkan kelompok laki-laki mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,33 poin. Berdasarkan klasifikasi desa-kota, penurunan hanya terjadi di wilayah perkotaan sebesar 0,54 poin dari 4,57 pada Februari 2012 menjadi 4,02 pada Mei 2012, sedangkan di wilayah perdesaan naik sebesar 0,44 poin.

Penurunan jumlah penganggur usia muda secara absolut mengakibatkan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur dan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda. Keadaan selama satu triwulan (Februari 2012-Mei 2012), *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur menurun sekitar 1,55 persen. Pada Mei

2012 *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur adalah 52,02 persen. Artinya, pada Mei 2012 dari 100 penganggur terdapat sekitar 52 orang penganggur yang diantaranya berusia antara 15 sampai 24 tahun.

Sementara itu pada Februari 2012 *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda adalah 9,77 persen dan pada Mei 2012 ini *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda turun menjadi 9,13 persen. Artinya, pada Mei 2012 dari 100 penduduk usia muda terdapat sekitar 9 orang diantaranya yang menganggur.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
TPT Penduduk Usia Muda (%)	19,08	17,93
a. Laki	19,33	19,14
b. Perempuan	18,69	15,95
c. Perkotaan	22,67	20,38
d. Perdesaan	15,60	15,63
Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa	5,35	5,05
a. Laki	6,19	6,52
b. Perempuan	4,37	3,52
c. Perkotaan	4,57	4,02
d. Perdesaan	6,95	7,39
Share Penganggur Usia Muda terhadap Total Penganggur	53,57	52,02
a. Laki	57,10	58,47
b. Perempuan	48,67	42,80
c. Perkotaan	49,90	46,19
d. Perdesaan	59,77	61,49
Share Penganggur Usia Muda terhadap Total Penduduk Usia Muda	9,77	9,13
a. Laki	12,04	12,01
b. Perempuan	7,47	6,23
c. Perkotaan	11,44	10,05
d. Perdesaan	8,10	8,22

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Cara lainnya, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012
(Persen)

Indikator	Februari	Mei
TPT Nasional	6,32	6,09
Tidak Pernah Sekolah	2,12	2,53
a. Laki	2,92	3,96
b. Perempuan	1,52	1,45
c. Perkotaan	4,84	4,04
d. Perdesaan	1,23	2,06
Sekolah Dasar	5,04	4,88
a. Laki	5,32	5,09
b. Perempuan	4,59	4,53
c. Perkotaan	6,70	6,34
d. Perdesaan	3,99	3,97
Sekolah Menengah	10,05	9,73
a. Laki	8,28	8,03
b. Perempuan	13,56	13,12
c. Perkotaan	10,67	10,31
d. Perdesaan	8,69	8,48
Sekolah Tinggi	7,12	6,35
a. Laki	4,91	4,91
b. Perempuan	9,64	8,06
c. Perkotaan	7,45	7,05
d. Perdesaan	6,05	4,10

Dari tabel di atas secara umum dapat dikatakan bahwa TPT menurut tingkat pendidikan cenderung turun selama periode Februari 2012-Mei 2012 pada hampir semua jenjang pendidikan kecuali pada TPT untuk kelompok tidak pernah sekolah yang naik sebesar 0,41 persen poin dari 2,12 persen pada Februari 2012 menjadi 2,53 persen pada Mei 2012. TPT tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemui pada tingkat pendidikan sekolah menengah dimana pada Februari 2012 TPT pada tingkat pendidikan ini adalah 10,05 persen, sedangkan pada Mei 2012 turun menjadi 9,73.

Penurunan TPT tertinggi pada Mei 2012 terjadi pada tingkat pendidikan tinggi dengan penurunan sebesar 0,77 persen poin dibanding keadaan pada triwulan sebelumnya pada Februari 2012 (7,12 persen). Penurunan TPT pada kelompok pendidikan ini juga diikuti dengan penurunan TPT pada penduduk perempuan dengan penurunan sebesar 1,58 persen poin, sedangkan pada laki-laki angka ini masih tetap atau tidak menunjukkan adanya perubahan selama kurun waktu satu triwulan (Februari 2012-Mei 2012). Masih pada jenjang yang sama menurut Sakernas Mei 2012 baik TPT baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan selama kurun waktu satu triwulan terakhir, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,40 persen poin dan 1,95 persen poin.

Kenaikan TPT terbesar secara keseluruhan ternyata terjadi pada kelompok penduduk laki-laki yang tidak pernah bersekolah. Kenaikan sebesar 1,04 persen poin terjadi selama periode Februari 2012-Mei 2012. Pada Februari 2012 TPT pada kelompok ini adalah 2,92 persen, sedangkan pada Mei 2012 meningkat menjadi 3,96 persen.

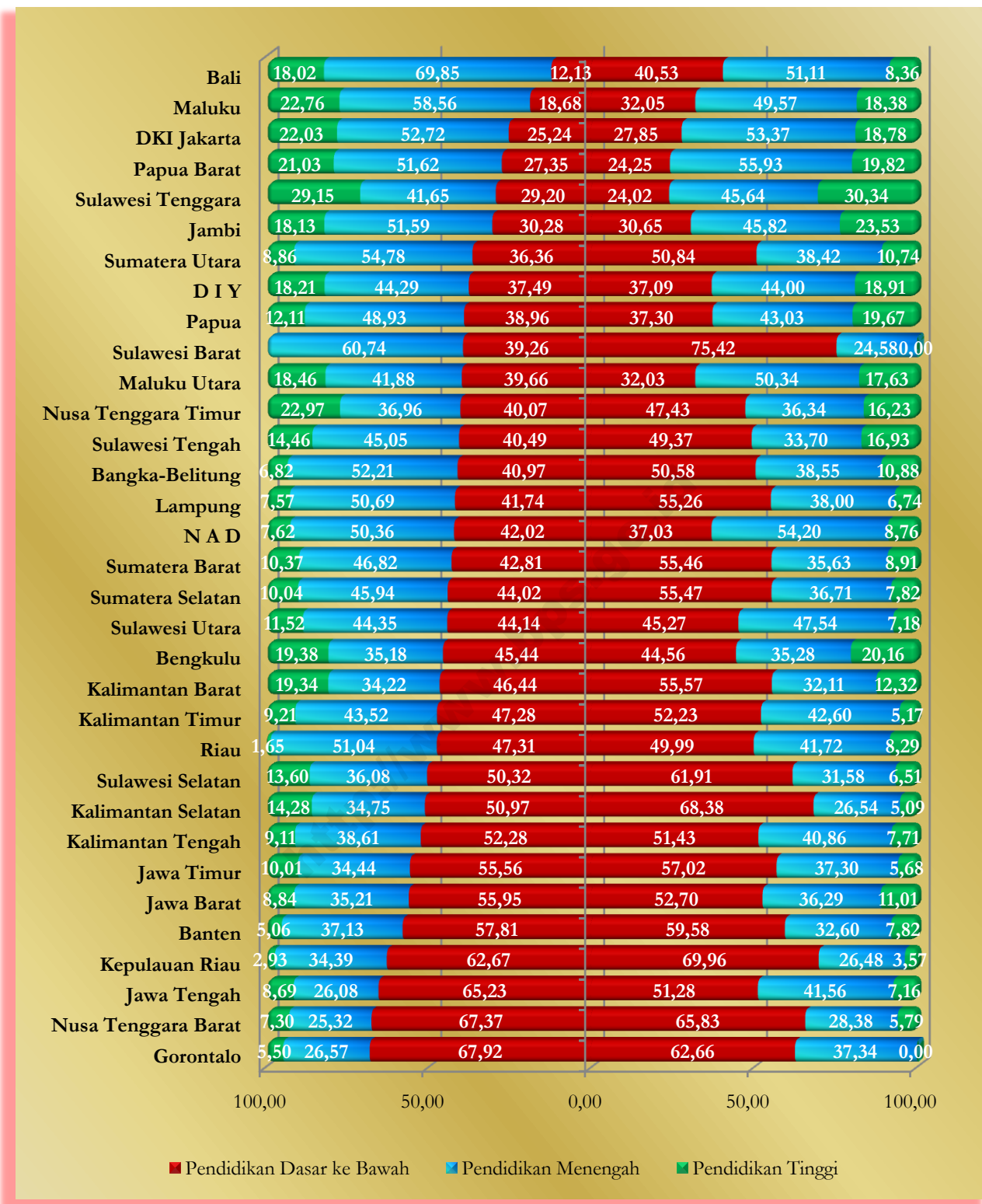
Melihat komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap, berdasarkan tingkat keahlian mereka. Berdasarkan data Sakernas selama Februari 2012-Mei 2012 menunjukkan bahwa penganggur terbanyak adalah penganggur dengan pendidikan sekolah dasar. Pada Mei 2012, persentase penganggur dengan pendidikan sekolah dasar adalah 49,16 persen dan meningkat sebesar 0,27 persen poin jika dibanding Februari 2012 (48,89 persen). Sementara itu selama periode satu triwulan terakhir, penurunan persentase penganggur berdasarkan pendidikan hanya terjadi pada mereka yang berpendidikan tinggi. Pada periode Februari 2012-Mei 2012 terjadi penurunan sebesar 0,65 persen poin, yaitu 10,44 persen pada Februari 2012 menjadi 9,79 persen pada Mei 2012. Sementara kenaikan terbesar terjadi pada komposisi penganggur yang tidak pernah

mengenyam pendidikan yaitu sebesar 0,35 persen poin (1,62 persen pada Februari 2012 menjadi 1,97 persen pada Mei 2012).

Seperti yang terlihat pada tabel berikut, berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, persentase yang menunjukkan penganggur perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki justru terlihat pada pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi. Sementara persentase penganggur dengan tingkat pendidikan rendah (yang terdiri dari mereka yang tidak pernah sekolah dan mereka yang telah menamatkan sekolah dasar) di wilayah perdesaan lebih besar daripada perkotaan.

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Nasional	100,00	100,00
Tidak Pernah Sekolah	1,62	1,97
a. Laki	1,64	2,25
b. Perempuan	1,58	1,57
c. Perkotaan	1,45	1,20
d. Perdesaan	1,90	3,21
Sekolah Dasar	48,89	49,16
a. Laki	54,97	54,26
b. Perempuan	40,43	41,88
c. Perkotaan	40,13	39,58
d. Perdesaan	63,69	64,74
Sekolah Menengah	39,06	39,08
a. Laki	36,79	36,51
b. Perempuan	42,21	42,76
c. Perkotaan	45,21	45,85
d. Perdesaan	28,67	28,08
Sekolah Tinggi	10,44	9,79
a. Laki	6,60	6,98
b. Perempuan	15,78	13,79
c. Perkotaan	13,22	13,36
d. Perdesaan	5,75	3,97



Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari dan Mei 2012

5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya.

Pada Mei 2012 jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 14,12 juta orang, dimana 7,78 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Apabila dibedakan menurut klasifikasi desa-kota, pada Mei 2012 ini jumlah setengah penganggur lebih banyak di daerah perdesaan yaitu sebesar 9,80 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 4,32 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur, Februari dan Mei 2012 (dalam juta)

Indikator	Februari	Mei
Total	14,87	14,12
a. Laki	8,07	7,79
b. Perempuan	6,80	6,33
c. Perkotaan	4,68	4,32
d. Perdesaan	10,19	9,80

Sementara itu kondisi selama kurun waktu triwulanan (Februari–Mei) 2012 ini memperlihatkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sekitar 750 ribu orang. Penurunan angka secara nasional ini ditandai dengan penurunan pada jumlah setengah penganggur menurut jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki masing-masing sebesar 460 ribu orang dan 290 ribu orang. Penurunan juga terjadi di wilayah perkotaan yaitu sebesar 360 ribu orang, sedangkan di wilayah perdesaan mengalami kenaikan sekitar 390 ribu orang.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Mei 2012 turun sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan kondisi Februari 2012. Tingkat setengah penganggur pada Februari 2012 adalah 12,35 persen, sedangkan pada Mei 2012 mengalami penurunan hingga mencapai 11,70 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada

Februari 2012 dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 12 orang setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2012 turun menjadi 11 orang setengah penganggur per 100 angkatan kerja.

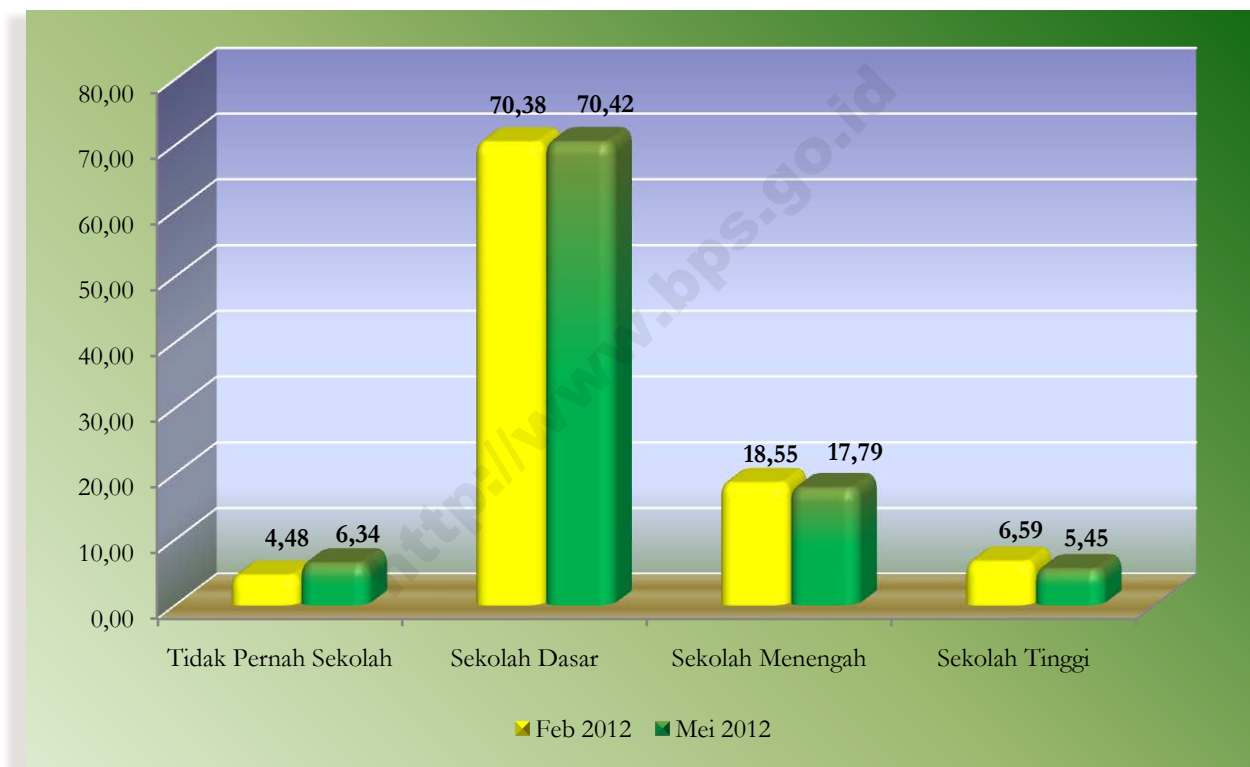
Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur,
Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	12,35	11,70
a. Laki	10,92	10,47
b. Perempuan	14,62	13,67
c. Perkotaan	7,96	7,37
d. Perdesaan	16,53	15,80
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	13,18	12,46
a. Laki	11,61	11,11
b. Perempuan	15,70	14,63
c. Perkotaan	8,67	7,99
d. Perdesaan	17,33	16,54

Pada periode Februari 2012-Mei 2012 juga terjadi penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja. Pada Februari 2012, dari 100 orang penduduk yang bekerja 13 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2012 terjadi penurunan hingga mencapai 12 orang setengah penganggur per 100 penduduk bekerja. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja lebih terlihat pada kelompok perempuan. Pada Februari 2012, dari 100 orang penduduk yang bekerja, 15 orang perempuan diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Mei 2012 hanya sekitar 14 orang perempuan yang merupakan setengah penganggur (dari 100 penduduk bekerja).

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah juga terjadi penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 0,68 persen poin, sementara di perdesaan turun sebesar 0,79 persen poin.

Menilik komposisi setengah penganggur berdasarkan tingkat pendidikan, penurunan persentase setengah penganggur terbesar terdapat pada kelompok penduduk yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 1,14 persen poin (Februari - Mei) 2012. Apabila dirunut lagi berdasarkan jenis kelamin, pada tingkat pendidikan yang sama penurunan yang relatif besar juga terjadi pada kelompok perempuan dengan penurunan sebesar 1,94 persen poin sementara laki-laki mengalami penurunan sangat tipis sebesar 0,41 persen poin. Penurunan pada tingkat pendidikan ini juga terjadi baik di wilayah perdesaan maupun di perkotaan. Di perdesaan turun 0,68 persen poin, sementara di perkotaan turun sebesar 1,95 persen poin.



Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Tidak Pernah Sekolah	4,48	6,34
a. Laki	3,66	4,51
b. Perempuan	5,45	8,59
c. Perkotaan	2,89	4,29
d. Perdesaan	5,21	7,25
Sekolah Dasar	70,38	70,42
a. Laki	72,69	72,64
b. Perempuan	67,65	67,68
c. Perkotaan	58,41	59,44
d. Perdesaan	75,89	75,26
Sekolah Menengah	18,55	17,79
a. Laki	19,27	18,86
b. Perempuan	17,70	16,47
c. Perkotaan	26,70	26,22
d. Perdesaan	14,80	14,07
Sekolah Tinggi	6,59	5,45
a. Laki	4,39	3,98
b. Perempuan	9,20	7,26
c. Perkotaan	11,99	10,04
d. Perdesaan	4,10	3,42

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan, tingkat ketidakaktifan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan yang tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang buruk, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25–34 tahun mungkin disebabkan karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna data dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan.

Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Di antara pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Namun, rendahnya tingkat ketidakaktifan wanita biasanya diikuti dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri pencari nafkah utama.

Fenomena kenaikan tingkat ketidakaktifan pada periode Februari 2012-Mei 2012 sebenarnya menggambarkan adanya perpindahan dari kelompok angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja mengalami kenaikan sekitar 270 ribu orang dari 52,45 juta orang pada Februari 2012 menjadi 52,72 juta orang pada Mei 2012. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sumbangan peningkatan perbukan angkatan kerja hanya berasal dari jenis kelamin perempuan, karena pada laki-laki justru terjadi penurunan.

Pada Mei 2012 tingkat ketidakaktifan adalah 30,40 persen yang naik sebesar 0,06 persen poin dibanding Februari 2012 (30,34 persen). Berdasarkan jenis kelamin, tingkat ketidakaktifan perempuan mengalami peningkatan 0,38 persen poin per seratus penduduk usia kerja pada Februari 2012 menjadi sekitar 47 perempuan per seratus penduduk usia kerja pada Mei 2012.

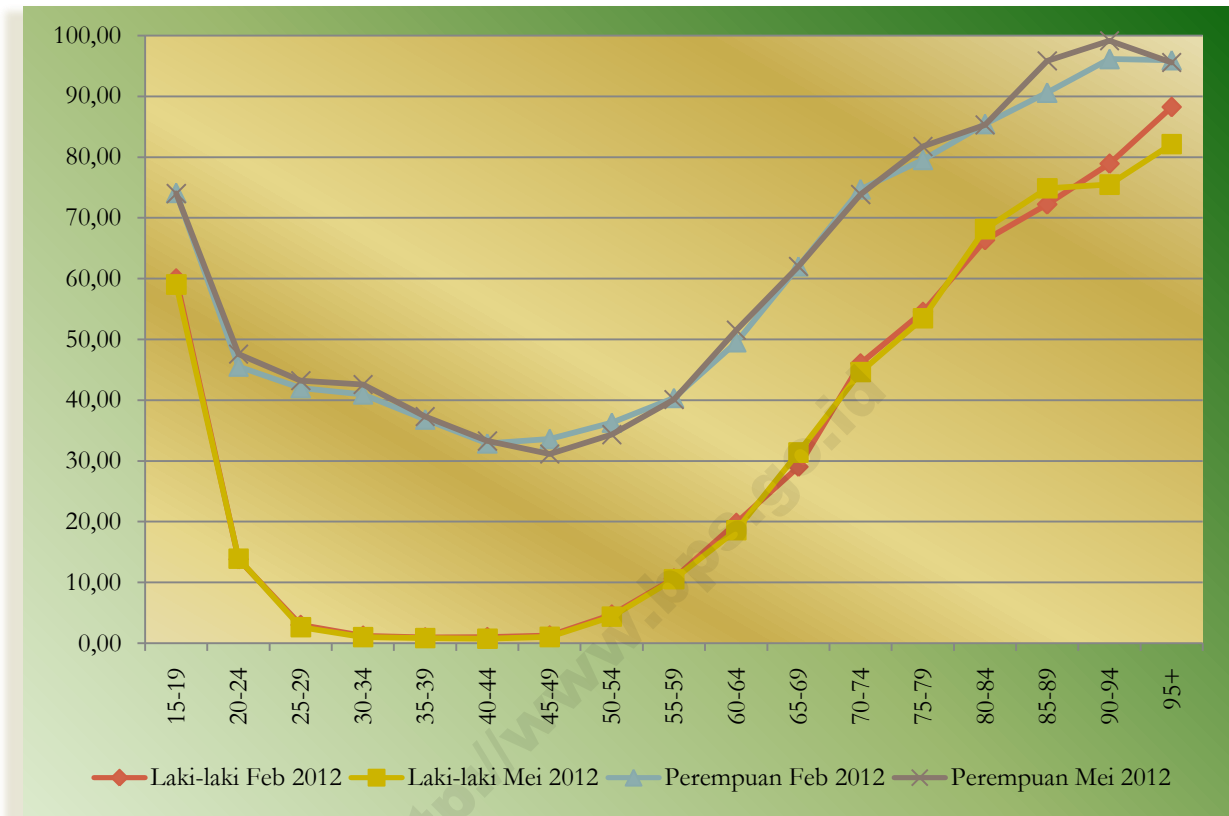
Sedangkan pada laki-laki terjadi penurunan sebesar 0,26 persen poin, dari sebesar 14,33 persen pada Februari 2012 menjadi 14,07 persen pada Mei 2012.

Demikian pula dengan tingkat ketidakaktifan berdasarkan wilayah di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen poin, yaitu dari 32,22 persen pada Februari 2012 naik menjadi 32,57 persen pada Mei 2012. Sebaliknya di wilayah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin, dari 28,45 persen pada Februari 2012 turun menjadi 28,22 persen pada Mei 2012.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan,
Februari dan Mei 2012
(Persen)

Indikator	Februari	Mei
Tingkat ketidakaktifan	30,34	30,40
a. Laki	14,33	14,07
b. Perempuan	46,29	46,67
c. Perkotaan	32,22	32,57
d. Perdesaan	28,45	28,22

Pada grafik di bawah ini, nampak pola tingkat ketidakaktifan yang membentuk huruf “J” mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk usia muda, lalu turun pada usia produktif dan kembali meningkat pada usia-usia tua.



Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012

6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Sayangnya, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Secara nasional, angka Sakernas Mei 2012 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibanding Sakernas pada triwulan sebelumnya. Angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 61,40 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 24,46 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 9,39 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya sekitar 4,74 persen angkatan kerja yang tidak pernah sekolah (Tabel 19).

Perbedaan kualitas angkatan kerja laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Mei 2012 persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah dua kali lipat lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki yang tidak pernah sekolah.

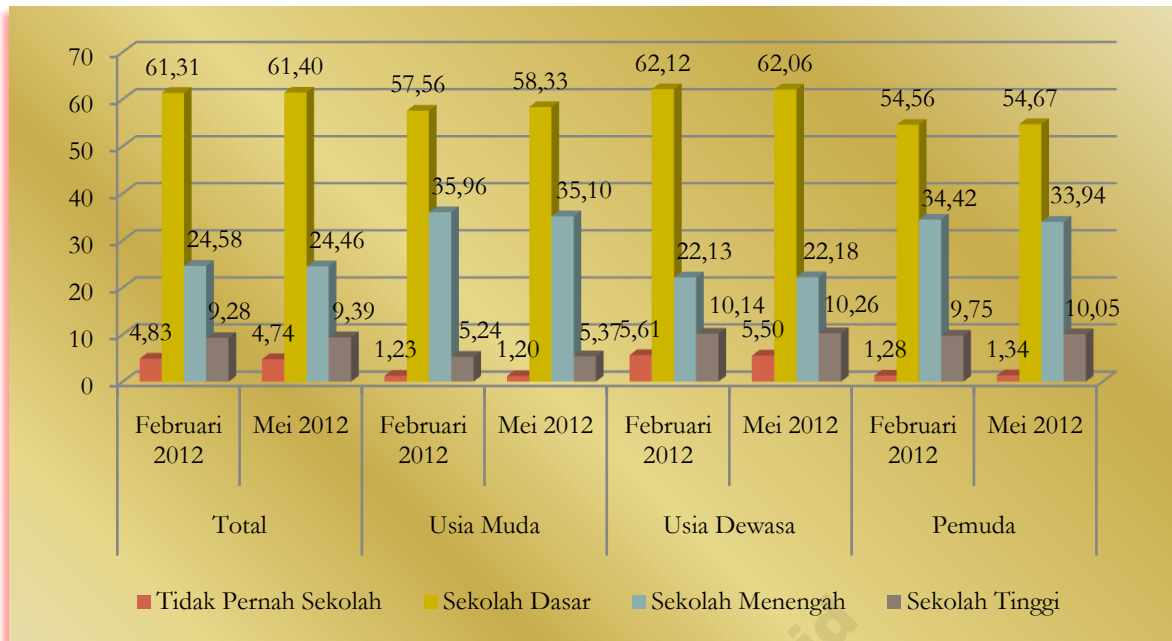
Terlihat pada Grafik 16 yang menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Pada kelompok usia muda baik pada Februari 2012 maupun Mei 2012, proporsi angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (sekitar 58 persen) kemudian disusul oleh sekolah menengah (sekitar 35 persen). Pada kelompok usia dewasa, angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar (di atas 62 persen), sementara mereka yang tamat sekolah menengah hanya sekitar 22 persen, akan

tetapi mereka yang tamat sekolah tinggi hanya mencapai sekitar 10 persen. Begitu pula pada kelompok pemuda (15-30 tahun), angkatan kerja yang menamatkan sekolah dasar mencapai 54 persen lebih, sementara mereka yang tamat sekolah menengah dan tinggi masing-masing sekitar 34 persen dan sekitar 10 persen.

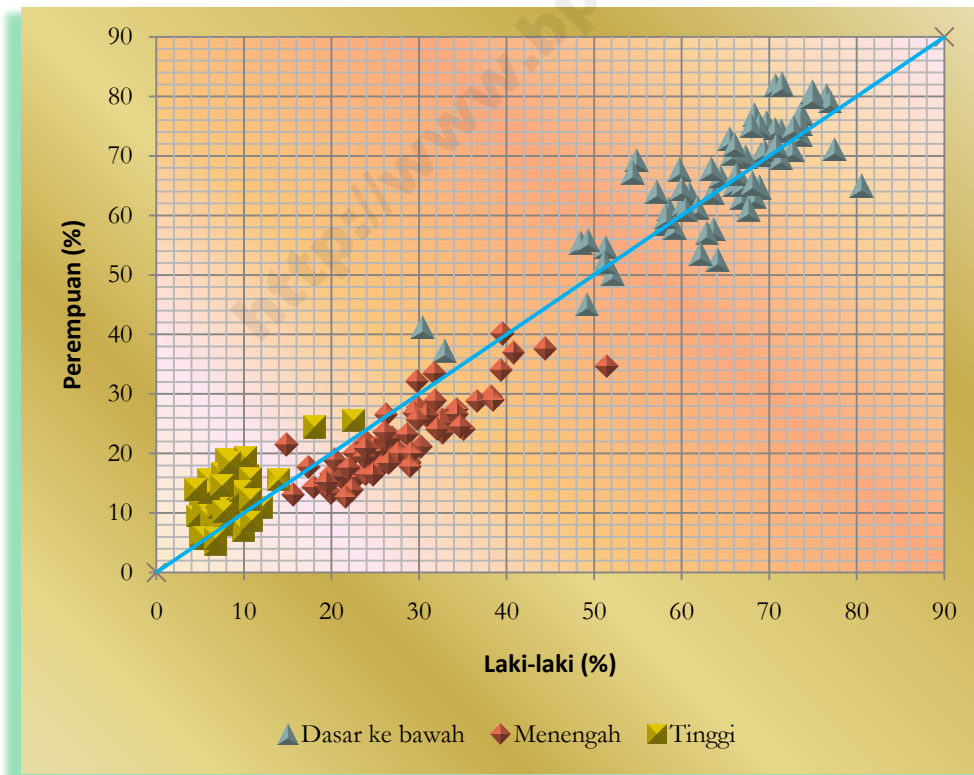
Merujuk pada Grafik 17, baik pada Februari 2012 maupun Mei 2012, pada perempuan angkatan kerja lebih banyak bergerombol pada jenjang pendidikan rendah (dasar ke bawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan yang menengah.

Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Indikator	Februari	Mei
Tidak Pernah Sekolah	4,83	4,74
a. Laki	3,36	3,30
b. Perempuan	7,16	7,05
c. Perkotaan	2,44	2,31
d. Perdesaan	7,11	7,04
Sekolah Dasar	61,31	61,40
a. Laki	61,95	61,99
b. Perempuan	60,30	60,46
c. Perkotaan	48,68	48,48
d. Perdesaan	73,37	73,63
Sekolah Menengah	24,58	24,46
a. Laki	26,63	26,43
b. Perempuan	21,33	21,30
c. Perkotaan	34,46	34,51
d. Perdesaan	15,16	14,95
Sekolah Tinggi	9,28	9,39
a. Laki	8,06	8,27
b. Perempuan	11,21	11,19
c. Perkotaan	14,42	14,70
d. Perdesaan	4,36	4,37



Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
Februari dan Mei 2012
(dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 566,47	1 603,69	3 170,16	1 574,66	1 611,78	3 186,44
Sumatera Utara	4 328,22	4 468,70	8 796,92	4 337,72	4 478,54	8 816,26
Sumatera Barat	1 637,71	1 725,03	3 362,74	1 641,93	1 729,47	3 371,40
Riau	2 020,73	1 899,93	3 920,66	2 037,66	1 915,91	3 953,56
Jambi	1 140,61	1 094,41	2 235,03	1 147,09	1 100,89	2 247,98
Sumatera Selatan	2 708,15	2 634,43	5 342,58	2 719,07	2 645,05	5 364,12
Bengkulu	622,52	598,33	1 220,85	624,70	600,24	1 224,94
Lampung	2 812,44	2 650,14	5 462,59	2 819,31	2 656,68	5 475,99
Bangka-Belitung	473,23	433,60	906,83	476,61	436,75	913,35
Kepulauan Riau	658,81	626,68	1 285,49	666,51	633,82	1 300,33
DKI Jakarta	3 766,50	3 692,94	7 459,44	3 777,24	3 703,44	7 480,68
Jawa Barat	15 882,03	15 456,06	31 338,09	15 946,16	15 519,45	31 465,61
Jawa Tengah	11 741,26	12 178,62	23 919,88	11 743,33	12 182,53	23 925,85
D I Y	1 335,92	1 398,82	2 734,75	1 338,64	1 401,54	2 740,18
Jawa Timur	13 899,88	14 614,70	28 514,58	13 917,93	14 633,27	28 551,19
Banten	3 968,05	3 815,21	7 783,26	3 992,81	3 838,92	7 831,74
Bali	1 488,91	1 491,55	2 980,47	1 495,90	1 498,84	2 994,75
Nusa Tenggara Barat	1 488,50	1 660,62	3 149,12	1 491,96	1 664,22	3 156,18
Nusa Tenggara Timur	1 473,87	1 556,66	3 030,53	1 479,75	1 563,80	3 043,55
Kalimantan Barat	1 546,90	1 483,94	3 030,84	1 549,38	1 486,55	3 035,93
Kalimantan Tengah	823,33	745,99	1 569,32	826,38	748,60	1 574,98
Kalimantan Selatan	1 331,23	1 318,25	2 649,47	1 336,89	1 323,92	2 660,81
Kalimantan Timur	1 393,16	1 228,46	2 621,62	1 405,31	1 239,04	2 644,35
Sulawesi Utara	847,86	820,21	1 668,07	850,03	822,14	1 672,17
Sulawesi Tengah	927,04	885,18	1 812,22	931,05	888,89	1 819,93
Sulawesi Selatan	2 690,18	2 951,77	5 641,95	2 696,55	2 958,47	5 655,02
Sulawesi Tenggara	741,68	754,99	1 496,67	744,82	758,56	1 503,38
Gorontalo	363,71	368,31	732,02	365,48	370,21	735,69
Sulawesi Barat	382,26	390,44	772,70	384,59	392,82	777,41
Maluku	510,78	512,19	1 022,97	514,09	515,52	1 029,60
Maluku Utara	354,38	340,40	694,78	356,37	342,26	698,63
Papua Barat	284,16	247,33	531,49	286,78	249,28	536,06
Papua	1 062,03	945,85	2 007,88	1 075,19	957,50	2 032,69
Indonesia	86 272,51	86 593,46	172 865,97	86 551,87	86 868,87	173 420,74

Lampiran 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur,
Februari dan Mei 2012
(dalam juta)

Kelompok Umur	Februari	Mei
15 Tahun ke atas	172,87	173,42
Laki-laki	86,27	86,55
Perempuan	86,59	86,87
Perkotaan	86,75	87,03
Perdesaan	86,12	86,39
(15-24)	41,74	41,88
Laki-laki	20,99	21,06
Perempuan	20,75	20,82
Perkotaan	20,86	20,93
Perdesaan	20,88	20,95
(15-64)	161,01	161,62
Laki-laki	81,03	81,29
Perempuan	79,97	80,32
Perkotaan	81,00	81,31
Perdesaan	80,01	80,31
(25-54)	104,12	104,45
Laki-laki	52,33	52,51
Perempuan	51,78	51,95
Perkotaan	52,51	52,69
Perdesaan	51,61	51,77
(25-34)	42,13	42,28
Laki-laki	21,08	21,15
Perempuan	21,05	21,12
Perkotaan	21,37	21,45
Perdesaan	20,76	20,83
(35-54)	61,98	62,18
Laki-laki	31,25	31,35
Perempuan	30,73	30,82
Perkotaan	31,14	31,24
Perdesaan	30,85	30,94
(55-64)	15,15	15,28
Laki-laki	7,71	7,72
Perempuan	7,44	7,56
Perkotaan	7,63	7,69
Perdesaan	7,52	7,59
65 Tahun ke atas	11,86	11,80
Laki-laki	5,24	5,26
Perempuan	6,62	6,54
Perkotaan	5,75	5,73
Perdesaan	6,11	6,07

Lampiran 3. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012 (dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 284,43	803,26	2 087,69	1 299,48	784,74	2 084,22
Sumatera Utara	3 737,62	2 820,59	6 558,21	3 768,01	2 778,66	6 546,67
Sumatera Barat	1 385,02	966,17	2 351,19	1 391,46	952,45	2 343,91
Riau	1 756,55	866,95	2 623,50	1 780,65	938,47	2 719,12
Jambi	985,05	565,96	1 551,01	1 001,41	550,05	1 551,46
Sumatera Selatan	2 363,58	1 565,89	3 929,46	2 330,97	1 600,22	3 931,19
Bengkulu	536,94	376,87	913,81	546,42	376,53	922,95
Lampung	2 500,90	1 431,34	3 932,24	2 463,96	1 443,49	3 907,45
Bangka-Belitung	418,48	199,16	617,63	420,83	204,46	625,29
Kepulauan Riau	582,32	308,90	891,22	579,72	303,74	883,46
DKI Jakarta	3 213,45	2 069,78	5 283,23	3 274,77	1 983,55	5 258,32
Jawa Barat	13 565,84	6 572,82	20 138,66	13 667,06	6 416,58	20 083,64
Jawa Tengah	9 954,21	7 168,69	17 122,90	10 078,61	7 339,00	17 417,61
D I Y	1 072,01	855,16	1 927,17	1 058,91	851,30	1 910,21
Jawa Timur	11 902,89	7 928,80	19 831,69	11 952,41	7 930,82	19 883,23
Banten	3 476,76	1 921,89	5 398,64	3 483,80	1 916,29	5 400,09
Bali	1 257,18	1 050,37	2 307,55	1 272,45	1 055,90	2 328,34
Nusa Tenggara Barat	1 235,45	945,99	2 181,44	1 251,74	930,96	2 182,70
Nusa Tenggara Timur	1 243,87	1 022,14	2 266,01	1 245,91	988,44	2 234,35
Kalimantan Barat	1 340,81	917,22	2 258,03	1 334,95	868,88	2 203,83
Kalimantan Tengah	724,02	433,97	1 157,99	723,32	445,57	1 168,89
Kalimantan Selatan	1 160,68	726,76	1 887,43	1 167,67	700,39	1 868,07
Kalimantan Timur	1 238,96	593,22	1 832,18	1 264,71	601,89	1 866,60
Sulawesi Utara	715,38	399,29	1 114,67	724,39	386,14	1 110,53
Sulawesi Tengah	827,33	525,10	1 352,43	831,79	497,78	1 329,57
Sulawesi Selatan	2 258,45	1 383,98	3 642,43	2 267,43	1 408,00	3 675,42
Sulawesi Tenggara	647,36	446,78	1 094,14	636,80	436,12	1 072,92
Gorontalo	307,31	163,81	471,13	305,42	162,83	468,24
Sulawesi Barat	330,52	230,74	561,26	328,47	243,54	572,01
Maluku	413,98	271,16	685,13	418,58	259,78	678,35
Maluku Utara	295,30	175,92	471,22	297,03	172,89	469,92
Papua Barat	241,20	142,89	384,09	238,42	129,43	367,85
Papua	933,54	658,15	1 591,69	964,90	668,86	1 633,76
Indonesia	73 907,36	46 509,69	120 417,05	74 372,44	46 327,72	120 700,16

Lampiran 4. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Februari dan Mei 2012 (dalam juta)

Kelompok Umur	Februari	Mei
15 Tahun ke atas	120,42	120,70
Laki-laki	73,91	74,37
Perempuan	46,51	46,33
Perkotaan	58,80	58,69
Perdesaan	61,62	62,01
(15-24)	21,37	21,34
Laki-laki	13,08	13,21
Perempuan	8,30	8,13
Perkotaan	10,53	10,32
Perdesaan	10,85	11,02
(15-64)	115,74	116,08
Laki-laki	70,99	71,48
Perempuan	44,75	44,60
Perkotaan	56,94	56,93
Perdesaan	58,80	59,15
(25-54)	83,65	83,96
Laki-laki	51,33	51,62
Perempuan	32,32	32,34
Perkotaan	41,57	41,71
Perdesaan	42,08	42,25
(25-34)	32,94	32,82
Laki-laki	20,63	20,76
Perempuan	12,32	12,06
Perkotaan	16,79	16,68
Perdesaan	16,16	16,14
(35-54)	50,70	51,14
Laki-laki	30,70	30,86
Perempuan	20,00	20,28
Perkotaan	24,78	25,03
Perdesaan	25,92	26,11
(55-64)	10,72	10,78
Laki-laki	6,59	6,65
Perempuan	4,14	4,14
Perkotaan	4,85	4,90
Perdesaan	5,88	5,88
65 Tahun ke atas	4,67	4,62
Laki-laki	2,92	2,89
Perempuan	1,76	1,73
Perkotaan	1,86	1,76
Perdesaan	2,81	2,86

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
Februari dan Mei 2012
(Persen)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	82,00	50,09	65,85	82,52	48,69	65,41
Sumatera Utara	86,35	63,12	74,55	86,87	62,04	74,26
Sumatera Barat	84,57	56,01	69,92	84,75	55,07	69,52
Riau	86,93	45,63	66,91	87,39	48,98	68,78
Jambi	86,36	51,71	69,40	87,30	49,96	69,02
Sumatera Selatan	87,28	59,44	73,55	85,73	60,50	73,29
Bengkulu	86,25	62,99	74,85	87,47	62,73	75,35
Lampung	88,92	54,01	71,98	87,40	54,33	71,36
Bangka-Belitung	88,43	45,93	68,11	88,30	46,81	68,46
Kepulauan Riau	88,39	49,29	69,33	86,98	47,92	67,94
DKI Jakarta	85,32	56,05	70,83	86,70	53,56	70,29
Jawa Barat	85,42	42,53	64,26	85,71	41,35	63,83
Jawa Tengah	84,78	58,86	71,58	85,82	60,24	72,80
D I Y	80,24	61,13	70,47	79,10	60,74	69,71
Jawa Timur	85,63	54,25	69,55	85,88	54,20	69,64
Banten	87,62	50,37	69,36	87,25	49,92	68,95
Bali	84,44	70,42	77,42	85,06	70,45	77,75
Nusa Tenggara Barat	83,00	56,97	69,27	83,90	55,94	69,16
Nusa Tenggara Timur	84,39	65,66	74,77	84,20	63,21	73,41
Kalimantan Barat	86,68	61,81	74,50	86,16	58,45	72,59
Kalimantan Tengah	87,94	58,17	73,79	87,53	59,52	74,22
Kalimantan Selatan	87,19	55,13	71,24	87,34	52,90	70,21
Kalimantan Timur	88,93	48,29	69,89	89,99	48,58	70,59
Sulawesi Utara	84,37	48,68	66,82	85,22	46,97	66,41
Sulawesi Tengah	89,24	59,32	74,63	89,34	56,00	73,06
Sulawesi Selatan	83,95	46,89	64,56	84,09	47,59	64,99
Sulawesi Tenggara	87,28	59,18	73,10	85,50	57,49	71,37
Gorontalo	84,49	44,48	64,36	83,57	43,98	63,65
Sulawesi Barat	86,46	59,10	72,64	85,41	62,00	73,58
Maluku	81,05	52,94	66,98	81,42	50,39	65,88
Maluku Utara	83,33	51,68	67,82	83,35	50,51	67,26
Papua Barat	84,88	57,77	72,27	83,14	51,92	68,62
Papua	87,90	69,58	79,27	89,74	69,86	80,37
Indonesia	85,67	53,71	69,66	85,93	53,33	69,60

Lampiran 6. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
Februari dan Mei 2012
(dalam ribu)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 191,06	732,22	1 923,29	1 208,57	719,91	1 928,48
Sumatera Utara	3 549,53	2 595,04	6 144,57	3 577,59	2 555,24	6 132,83
Sumatera Barat	1 304,21	900,00	2 204,22	1 312,72	888,03	2 200,74
Riau	1 685,44	802,42	2 487,86	1 709,85	871,02	2 580,88
Jambi	957,77	536,63	1 494,40	976,96	525,59	1 502,55
Sumatera Selatan	2 244,59	1 465,09	3 709,68	2 249,49	1 469,55	3 719,05
Bengkulu	525,54	368,67	894,21	535,36	368,35	903,70
Lampung	2 411,07	1 319,90	3 730,97	2 378,07	1 334,67	3 712,74
Bangka-Belitung	406,95	193,54	600,49	415,35	197,07	612,42
Kepulauan Riau	558,09	280,85	838,93	550,62	283,02	833,64
DKI Jakarta	2 913,19	1 803,53	4 716,72	2 971,49	1 739,60	4 711,09
Jawa Barat	12 264,41	5 905,24	18 169,65	12 397,09	5 859,42	18 256,51
Jawa Tengah	9 390,35	6 726,08	16 116,42	9 505,20	6 889,51	16 394,71
D I Y	1 017,19	831,18	1 848,37	1 012,78	825,21	1 837,99
Jawa Timur	11 397,06	7 615,16	19 012,23	11 459,02	7 618,25	19 077,27
Banten	3 080,74	1 738,23	4 818,97	3 109,61	1 743,06	4 852,67
Bali	1 224,39	1 034,57	2 258,95	1 246,25	1 033,56	2 279,81
Nusa Tenggara Barat	1 190,93	876,88	2 067,81	1 208,18	862,74	2 070,92
Nusa Tenggara Timur	1 220,50	991,37	2 211,87	1 223,12	965,69	2 188,81
Kalimantan Barat	1 300,41	881,86	2 182,27	1 295,09	837,81	2 132,90
Kalimantan Tengah	709,49	417,08	1 126,57	713,55	428,41	1 141,96
Kalimantan Selatan	1 111,80	694,14	1 805,94	1 119,18	669,83	1 789,00
Kalimantan Timur	1 127,35	534,69	1 662,04	1 151,25	545,86	1 697,11
Sulawesi Utara	674,45	347,50	1 021,95	683,30	336,66	1 019,96
Sulawesi Tengah	807,93	494,03	1 301,96	805,49	467,98	1 273,47
Sulawesi Selatan	2 142,35	1 264,84	3 407,18	2 155,21	1 289,59	3 444,80
Sulawesi Tenggara	629,72	430,52	1 060,24	624,24	422,29	1 046,54
Gorontalo	295,79	152,70	448,49	295,44	152,97	448,40
Sulawesi Barat	327,55	222,07	549,62	321,49	238,36	559,85
Maluku	391,66	244,76	636,42	389,90	240,15	630,05
Maluku Utara	286,36	159,85	446,21	283,98	156,95	440,92
Papua Barat	233,71	125,13	358,85	227,97	119,48	347,45
Papua	908,06	637,41	1 545,47	933,34	643,08	1 576,42
Indonesia	69 479,64	43 323,16	112 802,81	70 046,74	43 298,87	113 345,61

Lampiran 7. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Total Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	76,03	45,66	60,67	76,75	44,67	60,52
Sumatera Utara	82,01	58,07	69,85	82,48	57,06	69,56
Sumatera Barat	79,64	52,17	65,55	79,95	51,35	65,28
Riau	83,41	42,23	63,46	83,91	45,46	65,28
Jambi	83,97	49,03	66,86	85,17	47,74	66,84
Sumatera Selatan	82,88	55,61	69,44	82,73	55,56	69,33
Bengkulu	84,42	61,62	73,25	85,70	61,37	73,78
Lampung	85,73	49,80	68,30	84,35	50,24	67,80
Bangka-Belitung	85,99	44,63	66,22	87,15	45,12	67,05
Kepulauan Riau	84,71	44,82	65,26	82,61	44,65	64,11
DKI Jakarta	77,34	48,84	63,23	78,67	46,97	62,98
Jawa Barat	77,22	38,21	57,98	77,74	37,76	58,02
Jawa Tengah	79,98	55,23	67,38	80,94	56,55	68,52
D I Y	76,14	59,42	67,59	75,66	58,88	67,08
Jawa Timur	81,99	52,11	66,68	82,33	52,06	66,82
Banten	77,64	45,56	61,91	77,88	45,40	61,96
Bali	82,23	69,36	75,79	83,31	68,96	76,13
Nusa Tenggara Barat	80,01	52,80	65,66	80,98	51,84	65,61
Nusa Tenggara Timur	82,81	63,69	72,99	82,66	61,75	71,92
Kalimantan Barat	84,07	59,43	72,00	83,59	56,36	70,26
Kalimantan Tengah	86,17	55,91	71,79	86,35	57,23	72,51
Kalimantan Selatan	83,52	52,66	68,16	83,72	50,59	67,24
Kalimantan Timur	80,92	43,53	63,40	81,92	44,06	64,18
Sulawesi Utara	79,55	42,37	61,27	80,39	40,95	61,00
Sulawesi Tengah	87,15	55,81	71,84	86,51	52,65	69,97
Sulawesi Selatan	79,64	42,85	60,39	79,92	43,59	60,92
Sulawesi Tenggara	84,90	57,02	70,84	83,81	55,67	69,61
Gorontalo	81,33	41,46	61,27	80,84	41,32	60,95
Sulawesi Barat	85,69	56,88	71,13	83,59	60,68	72,01
Maluku	76,68	47,79	62,21	75,84	46,58	61,19
Maluku Utara	80,81	46,96	64,22	79,69	45,86	63,11
Papua Barat	82,25	50,59	67,52	79,49	47,93	64,81
Papua	85,50	67,39	76,97	86,81	67,16	77,55
Indonesia	80,54	50,03	65,25	80,93	49,84	65,36

Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/gaji		Pengusaha		Berusaha Sendiri	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	33,66	34,42	4,45	3,57	35,77	36,81
Sumatera Utara	30,67	28,99	3,34	3,72	35,79	37,31
Sumatera Barat	28,42	29,84	4,07	4,65	40,15	37,58
Riau	37,80	36,73	5,85	5,96	34,90	34,46
Jambi	37,12	35,03	4,42	4,46	33,60	34,07
Sumatera Selatan	28,99	30,16	2,78	3,71	39,19	38,17
Bengkulu	24,14	24,57	2,86	3,05	42,94	42,00
Lampung	22,89	23,25	3,20	4,17	39,45	40,14
Bangka-Belitung	43,37	43,45	7,83	8,16	33,51	31,32
Kepulauan Riau	62,86	60,78	2,86	4,71	24,33	26,20
DKI Jakarta	64,68	64,66	4,46	6,26	23,11	22,61
Jawa Barat	39,71	39,55	3,51	4,03	32,40	32,43
Jawa Tengah	28,97	32,06	3,33	3,34	37,17	33,81
D I Y	38,61	37,56	3,96	4,33	34,31	34,47
Jawa Timur	28,90	27,29	3,44	4,20	35,01	35,73
Banten	49,90	51,34	4,13	3,26	25,97	24,32
Bali	36,36	36,57	3,24	3,91	33,43	33,48
Nusa Tenggara Barat	21,63	21,64	1,79	3,08	43,10	42,04
Nusa Tenggara Timur	16,98	16,79	1,15	1,60	41,39	42,30
Kalimantan Barat	26,17	28,39	2,90	3,25	40,81	38,60
Kalimantan Tengah	36,65	37,29	3,03	3,07	35,67	36,17
Kalimantan Selatan	33,35	32,83	3,45	3,09	38,58	40,20
Kalimantan Timur	50,09	51,47	3,91	4,80	30,23	29,00
Sulawesi Utara	34,18	33,18	3,82	3,91	39,87	40,00
Sulawesi Tengah	26,29	28,48	3,90	3,90	39,31	36,33
Sulawesi Selatan	28,96	30,54	4,10	3,99	42,68	40,73
Sulawesi Tenggara	28,59	29,72	2,96	3,06	39,48	38,03
Gorontalo	31,85	30,01	3,57	4,09	40,31	41,01
Sulawesi Barat	22,32	22,59	2,73	2,51	43,91	40,75
Maluku	25,69	24,52	1,66	2,25	44,51	46,29
Maluku Utara	26,76	28,54	2,99	3,68	41,64	41,43
Papua Barat	35,01	38,77	2,59	2,24	37,16	35,60
Papua	18,12	15,92	1,53	1,17	43,65	42,98
Indonesia	33,81	34,05	3,48	3,90	35,38	34,81

Lampiran 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2011-2012
(Lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas		Pekerja Keluarga		Rasio Pekerja Rentan	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	6,88	5,63	19,24	19,58	61,89	62,02
Sumatera Utara	6,13	6,15	24,06	23,83	65,98	67,29
Sumatera Barat	9,93	11,42	17,44	16,51	67,51	65,51
Riau	6,31	7,12	15,15	15,73	56,36	57,31
Jambi	6,75	8,63	18,12	17,81	58,47	60,51
Sumatera Selatan	3,79	3,45	25,25	24,52	68,23	66,13
Bengkulu	6,32	5,37	23,73	25,01	72,99	72,38
Lampung	10,95	11,06	23,51	21,38	73,91	72,58
Bangka-Belitung	2,53	3,16	12,77	13,91	48,81	48,39
Kepulauan Riau	1,93	2,04	8,02	6,26	34,28	34,50
DKI Jakarta	1,59	1,87	6,15	4,59	30,86	29,07
Jawa Barat	15,12	15,74	9,27	8,25	56,78	56,42
Jawa Tengah	14,44	15,28	16,10	15,51	67,70	64,60
D I Y	7,38	8,07	15,73	15,57	57,42	58,11
Jawa Timur	13,35	13,67	19,29	19,12	67,65	68,52
Banten	12,16	12,22	7,83	8,85	45,96	45,39
Bali	8,38	8,58	18,58	17,46	60,39	59,52
Nusa Tenggara Barat	13,22	15,81	20,25	17,42	76,58	75,28
Nusa Tenggara Timur	3,68	4,89	36,81	34,42	81,87	81,61
Kalimantan Barat	2,34	3,90	27,78	25,86	70,93	68,35
Kalimantan Tengah	2,43	2,90	22,21	20,57	60,31	59,64
Kalimantan Selatan	5,79	5,64	18,82	18,24	63,20	64,07
Kalimantan Timur	2,52	2,25	13,24	12,47	45,99	43,73
Sulawesi Utara	10,25	9,43	11,88	13,48	62,00	62,90
Sulawesi Tengah	8,29	10,09	22,21	21,20	69,82	67,62
Sulawesi Selatan	3,89	4,45	20,38	20,30	66,94	65,47
Sulawesi Tenggara	3,49	4,09	25,48	25,10	68,45	67,23
Gorontalo	12,08	12,40	12,19	12,50	64,58	65,91
Sulawesi Barat	4,84	5,37	26,21	28,79	74,96	74,91
Maluku	3,59	1,42	24,55	25,52	72,64	73,23
Maluku Utara	4,23	4,57	24,37	21,77	70,25	67,78
Papua Barat	1,78	2,09	23,47	21,30	62,41	58,99
Papua	0,91	1,21	35,80	38,70	80,35	82,90
Indonesia	10,04	10,53	17,29	16,71	62,71	62,04

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012

Provinsi	1. Pertanian		2. Pertambangan		3. Industri	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	50,24	51,69	0,33	0,60	4,36	3,62
Sumatera Utara	51,13	49,65	0,89	0,96	6,19	6,04
Sumatera Barat	42,35	41,15	1,86	2,56	7,19	7,23
Riau	44,80	46,66	1,11	1,28	5,99	5,24
Jambi	56,24	57,41	1,23	1,21	3,12	2,47
Sumatera Selatan	55,21	56,11	1,15	1,40	4,72	4,91
Bengkulu	58,53	60,26	0,64	0,69	3,88	3,78
Lampung	51,84	49,23	0,78	0,60	8,37	8,25
Bangka-Belitung	29,45	26,81	23,20	24,22	4,92	5,77
Kepulauan Riau	15,06	14,74	3,65	4,46	14,57	17,79
DKI Jakarta	2,21	1,77	0,42	0,74	13,62	13,04
Jawa Barat	19,96	20,55	0,89	0,93	20,58	19,62
Jawa Tengah	32,65	32,91	0,84	0,76	18,30	18,92
D I Y	24,24	24,71	0,21	0,43	15,65	16,37
Jawa Timur	40,41	40,54	0,63	0,79	13,63	13,53
Banten	15,20	15,78	1,22	0,91	21,15	22,13
Bali	28,94	27,25	0,75	0,87	12,91	13,83
Nusa Tenggara Barat	45,34	44,67	1,65	1,32	6,62	7,65
Nusa Tenggara Timur	68,16	65,93	1,29	1,36	4,31	5,93
Kalimantan Barat	63,59	61,90	3,29	3,35	3,17	3,55
Kalimantan Tengah	53,46	51,16	6,40	7,61	2,51	3,13
Kalimantan Selatan	38,20	37,38	5,67	5,33	10,38	11,23
Kalimantan Timur	28,95	28,55	9,06	8,77	4,72	5,69
Sulawesi Utara	33,98	34,71	3,55	4,47	7,20	6,91
Sulawesi Tengah	48,91	49,90	3,50	4,00	6,56	6,97
Sulawesi Selatan	43,12	44,94	1,30	1,23	6,97	7,38
Sulawesi Tenggara	44,98	44,69	3,03	3,01	5,79	7,10
Gorontalo	36,52	37,68	8,21	8,98	8,39	6,99
Sulawesi Barat	57,45	62,27	0,65	0,44	5,36	4,17
Maluku	52,25	54,03	1,61	0,32	4,74	5,54
Maluku Utara	55,04	53,06	2,70	3,30	3,50	3,35
Papua Barat	47,63	45,63	2,09	2,82	4,47	6,60
Papua	72,78	75,16	1,23	0,75	0,94	0,75
Indonesia	36,53	36,55	1,44	1,51	12,60	12,68

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012 (Lanjutan)

Provinsi	4. Listrik, Gas dan Air		5. Konstruksi		6. Perdagangan	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	0,11	0,16	6,16	5,46	13,88	13,52
Sumatera Utara	0,12	0,13	3,95	3,90	17,54	18,07
Sumatera Barat	0,14	0,24	4,60	4,75	19,83	21,03
Riau	0,26	0,35	3,87	3,52	21,51	20,28
Jambi	0,33	0,19	3,33	4,40	15,77	14,53
Sumatera Selatan	0,11	0,18	4,48	3,99	15,16	14,13
Bengkulu	0,05	0,09	4,05	3,42	15,31	14,13
Lampung	0,21	0,21	2,86	3,63	18,89	20,40
Bangka-Belitung	0,10	0,00	3,86	3,67	21,31	22,21
Kepulauan Riau	0,63	0,04	5,13	6,14	29,56	22,97
DKI Jakarta	0,36	0,37	3,12	3,06	36,31	37,11
Jawa Barat	0,41	0,38	7,54	7,72	26,47	26,33
Jawa Tengah	0,25	0,17	6,65	7,38	22,02	21,54
D I Y	0,00	0,32	5,88	5,42	27,00	24,63
Jawa Timur	0,16	0,13	5,45	5,65	20,36	20,14
Banten	0,44	0,37	4,84	6,01	24,81	24,97
Bali	0,09	0,15	8,02	8,70	28,67	27,69
Nusa Tenggara Barat	0,20	0,19	4,86	4,80	21,17	21,09
Nusa Tenggara Timur	0,12	0,06	2,09	2,48	6,77	7,07
Kalimantan Barat	0,24	0,15	4,26	4,47	12,58	13,42
Kalimantan Tengah	0,32	0,11	4,70	4,86	13,31	14,52
Kalimantan Selatan	0,39	0,45	5,31	4,86	20,59	22,00
Kalimantan Timur	0,63	0,33	6,23	5,92	19,57	20,60
Sulawesi Utara	0,40	0,47	6,20	6,90	20,82	19,78
Sulawesi Tengah	0,13	0,21	4,55	4,32	14,66	14,14
Sulawesi Selatan	0,54	0,40	5,29	4,52	19,35	18,55
Sulawesi Tenggara	0,21	0,13	3,51	5,34	17,57	16,38
Gorontalo	0,34	0,00	5,37	4,97	13,62	15,19
Sulawesi Barat	0,48	0,59	3,46	2,66	11,87	10,84
Maluku	0,23	0,46	4,09	2,96	13,03	13,82
Maluku Utara	0,39	0,21	3,64	3,04	10,36	10,67
Papua Barat	0,19	0,67	5,46	4,67	15,77	13,73
Papua	0,10	0,28	2,22	1,74	8,77	8,36
Indonesia	0,26	0,24	5,41	5,62	21,29	21,14

Lampiran 9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Mei 2012 (Lanjutan)

Provinsi	7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi		8. Lembaga Keuangan		9. Jasa Kemasyarakatan	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	3,62	4,05	1,05	1,09	20,25	19,80
Sumatera Utara	4,48	4,95	1,28	1,56	14,40	14,73
Sumatera Barat	4,59	4,29	2,05	2,07	17,40	16,67
Riau	3,98	4,02	2,69	2,99	15,80	15,66
Jambi	2,97	3,43	1,85	1,36	15,17	15,00
Sumatera Selatan	3,98	3,60	1,26	1,76	13,92	13,93
Bengkulu	2,40	2,46	1,02	1,10	14,12	14,08
Lampung	3,16	3,81	1,08	0,95	12,81	12,92
Bangka-Belitung	1,49	1,77	2,53	2,26	13,13	13,27
Kepulauan Riau	6,89	5,35	2,81	3,19	21,69	25,32
DKI Jakarta	9,42	9,28	10,67	11,58	23,87	23,05
Jawa Barat	6,13	6,11	3,15	3,47	14,87	14,88
Jawa Tengah	3,80	3,36	1,90	1,79	13,59	13,17
D I Y	3,94	3,56	2,75	3,24	20,33	21,31
Jawa Timur	3,49	3,59	1,87	1,89	13,99	13,75
Banten	7,07	7,39	4,66	4,79	20,61	17,66
Bali	3,03	3,15	3,44	3,62	14,14	14,75
Nusa Tenggara Barat	4,37	3,61	1,22	1,36	14,57	15,31
Nusa Tenggara Timur	4,41	4,51	1,17	1,09	11,68	11,58
Kalimantan Barat	2,02	2,23	0,97	0,89	9,88	10,04
Kalimantan Tengah	3,08	2,98	1,18	0,98	15,03	14,65
Kalimantan Selatan	3,70	3,70	1,28	1,28	14,48	13,78
Kalimantan Timur	5,39	4,35	3,51	3,27	21,94	22,54
Sulawesi Utara	8,34	7,72	2,94	1,60	16,57	17,45
Sulawesi Tengah	3,34	3,01	0,79	0,96	17,56	16,48
Sulawesi Selatan	4,80	4,44	1,52	1,42	17,10	17,11
Sulawesi Tenggara	4,29	3,49	1,16	1,24	19,45	18,62
Gorontalo	5,34	6,07	1,76	0,93	20,46	19,19
Sulawesi Barat	3,79	2,78	1,02	0,46	15,91	15,80
Maluku	4,47	4,56	1,04	0,45	18,54	17,84
Maluku Utara	6,18	5,79	0,81	1,50	17,38	19,08
Papua Barat	5,81	4,96	1,12	1,96	17,46	18,96
Papua	3,16	3,20	0,94	0,90	9,87	8,86
Indonesia	4,60	4,53	2,46	2,57	15,40	15,17

Lampiran 10. Indikator Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (dalam ribu)		Tingkat Pekerja Paruh Waktu (Persen)		Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (Persen)	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	402,70	438,46	20,94	22,74	56,78	58,66
Sumatera Utara	1 264,37	1 303,94	20,58	21,26	60,42	60,12
Sumatera Barat	456,56	455,67	20,71	20,71	55,98	54,73
Riau	620,21	660,94	24,93	25,61	45,30	50,59
Jambi	389,84	435,57	26,09	28,99	46,59	46,36
Sumatera Selatan	802,72	836,90	21,64	22,50	53,48	57,40
Bengkulu	141,70	169,64	15,85	18,77	59,31	54,56
Lampung	817,35	907,09	21,91	24,43	50,79	49,16
Bangka-Belitung	101,95	87,98	16,98	14,37	53,10	56,78
Kepulauan Riau	108,09	95,54	12,88	11,46	54,87	52,60
DKI Jakarta	320,37	225,69	6,79	4,79	61,57	69,98
Jawa Barat	2 158,80	2 225,94	11,88	12,19	54,02	58,74
Jawa Tengah	2 836,88	2 923,81	17,60	17,83	60,74	60,89
D I Y	334,44	338,49	18,09	18,42	58,91	61,14
Jawa Timur	4 112,48	4 053,96	21,63	21,25	58,26	58,30
Banten	473,66	468,46	9,83	9,65	62,89	61,94
Bali	644,79	442,56	28,54	19,41	56,66	58,85
Nusa Tenggara Barat	364,48	402,73	17,63	19,45	60,43	56,32
Nusa Tenggara Timur	652,73	667,72	29,51	30,51	59,23	58,06
Kalimantan Barat	540,08	614,53	24,75	28,81	57,10	55,31
Kalimantan Tengah	182,35	209,61	16,19	18,36	64,14	61,50
Kalimantan Selatan	414,19	405,11	22,93	22,64	54,97	56,91
Kalimantan Timur	236,13	246,05	14,21	14,50	58,27	50,13
Sulawesi Utara	170,40	190,12	16,67	18,64	52,58	50,33
Sulawesi Tengah	292,33	312,04	22,45	24,50	56,92	50,45
Sulawesi Selatan	809,11	818,24	23,75	23,75	51,62	53,62
Sulawesi Tenggara	217,31	238,40	20,50	22,78	57,49	61,05
Gorontalo	93,46	101,33	20,84	22,60	47,42	47,80
Sulawesi Barat	177,24	201,32	32,25	35,96	52,67	53,92
Maluku	129,54	140,19	20,35	22,25	56,74	59,28
Maluku Utara	79,38	94,00	17,79	21,32	55,07	54,27
Papua Barat	62,70	59,33	17,47	17,08	54,67	61,12
Papua	273,22	413,25	17,68	26,21	55,95	51,12
Indonesia	20 681,55	21 184,60	18,33	18,69	56,73	57,24

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012

Provinsi	0 jam*		1-14 jam		15-24 jam	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	8,65	2,22	7,86	5,80	15,92	16,26
Sumatera Utara	4,75	1,63	5,40	5,99	12,97	12,85
Sumatera Barat	7,40	1,68	8,25	8,31	13,62	13,31
Riau	7,46	1,09	9,12	9,50	14,35	13,69
Jambi	5,56	1,05	6,24	7,83	15,53	15,80
Sumatera Selatan	5,83	1,22	5,44	4,20	12,19	13,40
Bengkulu	5,22	1,34	5,29	5,10	11,33	11,19
Lampung	6,99	2,11	8,19	6,55	12,85	14,41
Bangka-Belitung	3,31	2,95	3,47	3,80	9,50	9,23
Kepulauan Riau	2,30	2,15	4,23	4,90	8,21	5,83
DKI Jakarta	2,29	0,73	2,25	1,28	4,09	3,24
Jawa Barat	3,90	1,38	3,66	3,51	8,38	8,73
Jawa Tengah	6,00	2,09	6,02	5,72	9,62	10,23
D I Y	6,46	1,70	7,92	6,75	7,10	9,54
Jawa Timur	6,92	0,89	7,01	6,87	13,11	12,65
Banten	3,22	1,01	3,80	3,75	7,67	7,81
Bali	4,49	1,16	8,61	5,37	13,50	9,45
Nusa Tenggara Barat	10,36	1,91	9,92	8,97	13,57	13,37
Nusa Tenggara Timur	8,88	3,10	8,08	9,38	17,02	17,60
Kalimantan Barat	5,92	1,48	6,01	6,23	15,10	19,37
Kalimantan Tengah	3,81	0,83	5,77	5,20	11,19	11,37
Kalimantan Selatan	7,17	2,79	5,35	6,02	15,52	14,67
Kalimantan Timur	3,19	1,06	4,38	4,44	8,60	8,01
Sulawesi Utara	5,39	2,22	5,88	5,68	11,65	12,02
Sulawesi Tengah	9,41	3,44	9,68	9,17	12,48	13,60
Sulawesi Selatan	11,58	2,32	10,48	9,58	13,52	14,42
Sulawesi Tenggara	10,27	3,92	9,69	8,66	14,96	14,60
Gorontalo	6,22	3,47	7,09	7,32	11,09	11,80
Sulawesi Barat	17,94	3,45	15,04	16,37	17,95	18,92
Maluku	7,47	4,51	5,06	3,82	12,45	11,92
Maluku Utara	8,02	1,83	7,33	7,42	13,72	16,92
Papua Barat	3,69	1,78	4,69	2,76	12,02	12,21
Papua	2,35	0,66	4,38	4,11	12,09	13,55
Indonesia	5,88	1,58	6,08	5,76	11,23	11,42

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012
(Lanjutan)

Provinsi	25-34 jam		35-39 jam		40-48 jam	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	20,03	20,17	13,73	13,64	22,09	24,24
Sumatera Utara	17,17	16,65	13,86	13,67	27,17	28,92
Sumatera Barat	13,58	14,54	11,20	9,59	24,93	26,56
Riau	16,78	16,04	8,58	9,24	24,26	24,75
Jambi	21,34	22,38	17,27	14,45	22,32	22,84
Sumatera Selatan	18,98	17,01	14,47	14,00	23,73	26,76
Bengkulu	13,00	12,30	13,04	13,50	29,83	31,41
Lampung	14,35	15,27	10,90	11,01	24,52	23,84
Bangka-Belitung	16,64	13,84	10,63	9,13	34,38	36,59
Kepulauan Riau	10,52	6,98	7,92	7,99	34,95	38,34
DKI Jakarta	5,52	4,29	4,62	4,30	48,98	48,46
Jawa Barat	11,05	10,44	8,48	8,30	35,38	36,79
Jawa Tengah	13,34	13,14	10,48	10,43	29,65	29,99
D I Y	11,53	11,23	10,18	11,00	32,09	32,72
Jawa Timur	15,16	15,38	9,35	9,90	25,56	26,25
Banten	8,66	9,18	6,88	7,47	43,64	43,51
Bali	18,84	11,83	8,78	9,42	23,79	24,55
Nusa Tenggara Barat	15,74	17,83	9,97	11,23	21,64	21,81
Nusa Tenggara Timur	21,34	20,38	13,37	15,14	24,86	22,40
Kalimantan Barat	19,59	19,68	11,58	12,06	25,21	22,98
Kalimantan Tengah	12,71	14,11	11,31	11,87	29,67	29,24
Kalimantan Selatan	17,55	15,52	11,84	12,20	25,63	27,56
Kalimantan Timur	10,63	9,13	12,78	11,36	26,95	31,42
Sulawesi Utara	13,24	13,53	11,38	10,18	31,15	33,91
Sulawesi Tengah	16,98	16,21	15,01	12,79	22,62	23,78
Sulawesi Selatan	15,19	15,48	12,11	11,22	21,27	22,59
Sulawesi Tenggara	15,30	16,48	13,49	13,28	21,85	20,41
Gorontalo	14,20	15,94	11,19	11,52	24,53	23,52
Sulawesi Barat	19,84	20,26	10,01	10,38	21,26	16,72
Maluku	16,67	18,44	16,20	15,54	24,35	26,24
Maluku Utara	17,98	19,79	16,73	17,58	26,09	21,14
Papua Barat	15,72	16,55	14,31	16,49	29,51	31,41
Papua	21,59	28,58	20,03	20,31	28,84	21,29
Indonesia	14,21	13,96	10,45	10,46	29,40	30,04

Lampiran 11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Mei 2012
(Lanjutan)

Provinsi	49-59 jam		Lebih dari 60 jam	
	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	10,83	10,88	7,71	6,79
Sumatera Utara	10,46	10,24	11,64	10,05
Sumatera Barat	15,42	15,32	10,47	10,68
Riau	12,73	13,02	12,71	12,67
Jambi	9,61	10,20	6,51	5,44
Sumatera Selatan	14,60	15,39	9,04	8,02
Bengkulu	16,56	18,31	9,16	6,84
Lampung	18,52	18,06	8,47	8,76
Bangka-Belitung	15,93	15,47	7,79	9,01
Kepulauan Riau	17,03	15,84	15,93	17,99
DKI Jakarta	13,43	16,12	20,02	21,57
Jawa Barat	16,09	15,85	15,10	15,00
Jawa Tengah	18,05	18,28	10,66	10,13
D I Y	19,05	17,98	9,90	9,09
Jawa Timur	16,65	16,78	11,70	11,28
Banten	13,40	12,76	14,00	14,50
Bali	13,74	21,68	9,34	16,53
Nusa Tenggara Barat	16,71	14,81	10,03	10,06
Nusa Tenggara Timur	7,30	7,57	5,53	4,42
Kalimantan Barat	13,98	11,34	6,86	6,86
Kalimantan Tengah	14,21	13,49	13,64	13,89
Kalimantan Selatan	12,95	13,14	8,03	8,11
Kalimantan Timur	15,06	16,49	19,96	18,09
Sulawesi Utara	11,75	12,49	11,94	9,97
Sulawesi Tengah	11,38	12,77	8,88	8,24
Sulawesi Selatan	13,49	14,66	10,98	9,72
Sulawesi Tenggara	14,11	15,87	7,64	6,79
Gorontalo	13,99	12,77	12,52	13,67
Sulawesi Barat	8,00	7,03	3,81	6,88
Maluku	9,50	10,57	11,58	8,96
Maluku Utara	11,03	9,92	5,01	5,40
Papua Barat	10,52	10,23	10,33	8,57
Papua	6,56	5,92	5,80	5,58
Indonesia	14,98	15,24	11,72	11,53

Lampiran 12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Februari dan Mei 2012

Provinsi	Formal		Informal	
	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	41,24	41,80	58,76	58,20
Sumatera Utara	39,31	38,86	60,69	61,14
Sumatera Barat	40,46	41,92	59,54	58,08
Riau	49,62	49,28	50,38	50,72
Jambi	45,65	42,63	54,35	57,37
Sumatera Selatan	35,97	37,66	64,03	62,34
Bengkulu	33,04	32,86	66,96	67,14
Lampung	32,74	35,63	67,26	64,37
Bangka-Belitung	57,64	57,87	42,36	42,13
Kepulauan Riau	68,67	70,66	31,33	29,34
DKI Jakarta	75,86	78,13	24,14	21,87
Jawa Barat	51,36	51,73	48,64	48,27
Jawa Tengah	40,46	42,72	59,54	57,28
D I Y	52,35	51,66	47,65	48,34
Jawa Timur	39,94	39,49	60,06	60,51
Banten	60,22	61,20	39,78	38,80
Bali	49,39	50,23	50,61	49,77
Nusa Tenggara Barat	30,20	32,81	69,80	67,19
Nusa Tenggara Timur	21,56	22,25	78,44	77,75
Kalimantan Barat	33,20	35,27	66,80	64,73
Kalimantan Tengah	44,31	45,68	55,69	54,32
Kalimantan Selatan	43,99	43,86	56,01	56,14
Kalimantan Timur	59,66	63,31	40,34	36,69
Sulawesi Utara	43,79	42,89	56,21	57,11
Sulawesi Tengah	36,13	38,34	63,87	61,66
Sulawesi Selatan	40,06	41,18	59,94	58,82
Sulawesi Tenggara	38,41	39,15	61,59	60,85
Gorontalo	40,86	39,85	59,14	60,15
Sulawesi Barat	32,16	31,64	67,84	68,36
Maluku	33,06	33,14	66,94	66,86
Maluku Utara	33,58	36,31	66,42	63,69
Papua Barat	42,35	44,68	57,65	55,32
Papua	21,96	19,25	78,04	80,75
Indonesia	44,16	44,95	55,84	55,05

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
Februari dan Mei 2012
(Persen)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	7,27	8,84	7,88	7,00	8,26	7,47
Sumatera Utara	5,03	8,00	6,31	5,05	8,04	6,32
Sumatera Barat	5,83	6,85	6,25	5,66	6,76	6,11
Riau	4,05	7,44	5,17	3,98	7,19	5,08
Jambi	2,77	5,18	3,65	2,44	4,45	3,15
Sumatera Selatan	5,03	6,44	5,59	3,50	8,17	5,40
Bengkulu	2,12	2,17	2,14	2,02	2,17	2,09
Lampung	3,59	7,79	5,12	3,49	7,54	4,98
Bangka-Belitung	2,75	2,82	2,78	1,30	3,61	2,06
Kepulauan Riau	4,16	9,08	5,87	5,02	6,82	5,64
DKI Jakarta	9,34	12,86	10,72	9,26	12,30	10,41
Jawa Barat	9,59	10,16	9,78	9,29	8,68	9,10
Jawa Tengah	5,66	6,17	5,88	5,69	6,12	5,87
D I Y	5,11	2,80	4,09	4,36	3,06	3,78
Jawa Timur	4,25	3,96	4,13	4,13	3,94	4,05
Banten	11,39	9,56	10,74	10,74	9,04	10,14
Bali	2,61	1,50	2,11	2,06	2,12	2,08
Nusa Tenggara Barat	3,60	7,31	5,21	3,48	7,33	5,12
Nusa Tenggara Timur	1,88	3,01	2,39	1,83	2,30	2,04
Kalimantan Barat	3,01	3,85	3,36	2,99	3,58	3,22
Kalimantan Tengah	2,01	3,89	2,71	1,35	3,85	2,30
Kalimantan Selatan	4,21	4,49	4,32	4,15	4,36	4,23
Kalimantan Timur	9,01	9,87	9,29	8,97	9,31	9,08
Sulawesi Utara	5,72	12,97	8,32	5,67	12,81	8,16
Sulawesi Tengah	2,34	5,92	3,73	3,16	5,99	4,22
Sulawesi Selatan	5,14	8,61	6,46	4,95	8,41	6,27
Sulawesi Tenggara	2,73	3,64	3,10	1,97	3,17	2,46
Gorontalo	3,75	6,79	4,81	3,27	6,05	4,24
Sulawesi Barat	0,90	3,76	2,07	2,13	2,13	2,13
Maluku	5,39	9,74	7,11	6,85	7,56	7,12
Maluku Utara	3,03	9,13	5,31	4,39	9,22	6,17
Papua Barat	3,10	12,43	6,57	4,38	7,69	5,55
Papua	2,73	3,15	2,90	3,27	3,86	3,51
Indonesia	5,99	6,85	6,32	5,82	6,54	6,09

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan,
Februari dan Mei 2012
(Persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	5,65	4,69	13,61	14,06	4,88	5,38
Sumatera Utara	3,73	5,21	11,32	8,12	7,04	8,07
Sumatera Barat	4,43	5,64	10,32	7,40	5,79	5,18
Riau	4,16	4,36	8,29	6,66	0,91	4,29
Jambi	1,67	1,44	8,19	6,39	6,20	7,35
Sumatera Selatan	3,65	4,38	10,44	8,60	7,12	4,86
Bengkulu	1,42	1,40	3,26	2,99	4,94	4,71
Lampung	2,97	3,86	11,96	8,72	6,09	4,87
Bangka-Belitung	1,71	1,56	5,50	3,06	2,67	3,09
Kepulauan Riau	7,70	8,24	5,12	4,07	1,34	1,30
DKI Jakarta	7,83	8,34	13,55	13,16	9,97	8,49
Jawa Barat	8,23	7,22	13,63	13,32	10,47	11,33
Jawa Tengah	5,16	4,07	8,35	12,75	6,95	6,10
D I Y	2,94	2,84	5,46	4,73	5,06	4,62
Jawa Timur	3,22	3,25	6,80	7,29	5,37	2,84
Banten	10,23	9,87	13,61	11,58	5,44	7,72
Bali	0,42	1,40	4,90	3,58	3,86	1,79
Nusa Tenggara Barat	4,94	4,75	6,24	6,96	4,86	3,67
Nusa Tenggara Timur	1,23	1,24	6,12	4,94	7,17	4,71
Kalimantan Barat	2,03	2,34	6,59	5,74	11,48	6,99
Kalimantan Tengah	2,01	1,65	5,28	4,88	2,61	2,02
Kalimantan Selatan	3,10	4,03	7,39	5,61	7,17	2,62
Kalimantan Timur	8,53	9,13	11,41	11,01	6,52	3,63
Sulawesi Utara	6,22	6,33	11,40	11,87	11,07	6,53
Sulawesi Tengah	2,26	3,07	7,62	6,41	4,90	7,14
Sulawesi Selatan	5,00	5,81	10,25	9,21	7,17	3,53
Sulawesi Tenggara	1,47	0,94	5,09	4,88	7,02	5,38
Gorontalo	4,35	3,58	7,45	8,91	3,39	Na
Sulawesi Barat	1,11	2,15	7,11	2,95	0,00	Na
Maluku	2,19	3,80	14,78	12,58	14,48	11,04
Maluku Utara	3,23	3,16	8,96	11,93	9,67	9,46
Papua Barat	3,02	2,31	11,68	10,37	12,20	9,20
Papua	1,49	1,70	7,94	8,70	5,55	11,79
Indonesia	4,83	4,71	10,05	9,73	7,12	6,35

Keterangan: Na=Not applicable/data tidak dapat dipublikasikan

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	42,02	37,03	50,36	54,20	7,62	8,76
Sumatera Utara	36,36	50,84	54,78	38,42	8,86	10,74
Sumatera Barat	42,81	55,46	46,82	35,63	10,37	8,91
Riau	47,31	49,99	51,04	41,72	1,65	8,29
Jambi	30,28	30,65	51,59	45,82	18,13	23,53
Sumatera Selatan	44,02	55,47	45,94	36,71	10,04	7,82
Bengkulu	45,44	44,56	35,18	35,28	19,38	20,16
Lampung	41,74	55,26	50,69	38,00	7,57	6,74
Bangka-Belitung	40,97	50,58	52,21	38,55	6,82	10,88
Kepulauan Riau	62,67	69,96	34,39	26,48	2,93	3,57
DKI Jakarta	25,24	27,85	52,72	53,37	22,03	18,78
Jawa Barat	55,95	52,70	35,21	36,29	8,84	11,01
Jawa Tengah	65,23	51,28	26,08	41,56	8,69	7,16
D I Y	37,49	37,09	44,29	44,00	18,21	18,91
Jawa Timur	55,56	57,02	34,44	37,30	10,01	5,68
Banten	57,81	59,58	37,13	32,60	5,06	7,82
Bali	12,13	40,53	69,85	51,11	18,02	8,36
Nusa Tenggara Barat	67,37	65,83	25,32	28,38	7,30	5,79
Nusa Tenggara Timur	40,07	47,43	36,96	36,34	22,97	16,23
Kalimantan Barat	46,44	55,57	34,22	32,11	19,34	12,32
Kalimantan Tengah	52,28	51,43	38,61	40,86	9,11	7,71
Kalimantan Selatan	50,97	68,38	34,75	26,54	14,28	5,09
Kalimantan Timur	47,28	52,23	43,52	42,60	9,21	5,17
Sulawesi Utara	44,14	45,27	44,35	47,54	11,52	7,18
Sulawesi Tengah	40,49	49,37	45,05	33,70	14,46	16,93
Sulawesi Selatan	50,32	61,91	36,08	31,58	13,60	6,51
Sulawesi Tenggara	29,20	24,02	41,65	45,64	29,15	30,34
Gorontalo	67,92	62,66	26,57	37,34	5,50	Na
Sulawesi Barat	39,26	75,42	60,74	24,58	Na	Na
Maluku	18,68	32,05	58,56	49,57	22,76	18,38
Maluku Utara	39,66	32,03	41,88	50,34	18,46	17,63
Papua Barat	27,35	24,25	51,62	55,93	21,03	19,82
Papua	38,96	37,30	48,93	43,03	12,11	19,67
Indonesia	50,50	51,13	39,06	39,08	10,44	9,79

Keterangan: Na=Not applicable/data tidak dapat dipublikasikan

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	61,68	65,93	26,91	22,44	11,40	11,63
Sumatera Utara	66,09	72,10	26,86	21,41	7,05	6,50
Sumatera Barat	62,52	70,28	26,12	21,26	11,36	8,45
Riau	68,42	73,56	24,48	18,85	7,10	7,59
Jambi	70,86	77,62	20,29	14,53	8,84	7,85
Sumatera Selatan	66,30	74,79	25,45	16,56	8,25	8,65
Bengkulu	67,79	67,84	24,32	20,59	7,89	11,57
Lampung	80,34	78,69	15,03	15,82	4,63	5,49
Bangka-Belitung	71,54	81,29	22,34	14,66	6,12	4,05
Kepulauan Riau	69,61	67,48	20,85	22,18	9,54	10,34
DKI Jakarta	46,73	45,16	31,51	30,07	21,76	24,78
Jawa Barat	82,44	82,11	12,67	11,62	4,90	6,27
Jawa Tengah	80,18	83,38	14,06	10,83	5,76	5,79
D I Y	50,44	58,98	39,84	30,62	9,71	10,40
Jawa Timur	79,82	83,18	15,26	11,32	4,93	5,50
Banten	85,01	81,45	11,56	13,03	3,42	5,52
Bali	62,89	72,37	29,47	18,57	7,64	9,06
Nusa Tenggara Barat	71,92	75,07	20,25	16,75	7,83	8,18
Nusa Tenggara Timur	78,96	85,59	15,60	10,09	5,44	4,32
Kalimantan Barat	80,77	85,81	16,08	9,72	3,14	4,47
Kalimantan Tengah	69,88	78,60	18,38	13,51	11,74	7,89
Kalimantan Selatan	75,97	80,62	17,07	11,93	6,96	7,45
Kalimantan Timur	66,36	61,71	21,90	24,57	11,74	13,72
Sulawesi Utara	64,85	69,77	31,68	23,00	3,47	7,22
Sulawesi Tengah	68,73	75,81	24,46	17,76	6,81	6,42
Sulawesi Selatan	68,71	73,70	19,82	15,74	11,48	10,56
Sulawesi Tenggara	65,66	71,34	24,92	16,64	9,41	12,02
Gorontalo	82,18	86,17	14,85	10,99	2,96	2,85
Sulawesi Barat	77,19	80,88	17,17	14,30	5,64	4,82
Maluku	65,28	75,29	29,12	18,37	5,60	6,33
Maluku Utara	75,34	72,05	20,92	20,22	3,74	7,74
Papua Barat	76,01	71,09	18,11	19,85	5,88	9,06
Papua	85,13	86,73	12,77	10,88	2,10	2,39
Indonesia	74,86	78,46	18,55	14,61	6,59	6,93

Lampiran 17. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Menurut Provinsi, Februari dan Mei 2012
(dalam ribu)

Provinsi	Februari	Mei
N A D	1 082,47	1 102,22
Sumatera Utara	2 238,72	2 269,59
Sumatera Barat	1 011,54	1 027,49
Riau	1 297,17	1 234,44
Jambi	684,02	696,52
Sumatera Selatan	1 413,12	1 432,93
Bengkulu	307,04	301,99
Lampung	1 530,35	1 568,54
Bangka-Belitung	289,20	288,06
Kepulauan Riau	394,28	416,87
DKI Jakarta	2 176,21	2 222,36
Jawa Barat	11 199,44	11 381,97
Jawa Tengah	6 796,99	6 508,24
D I Y	807,58	829,97
Jawa Timur	8 682,90	8 667,97
Banten	2 384,62	2 431,65
Bali	672,92	666,40
Nusa Tenggara Barat	967,68	973,48
Nusa Tenggara Timur	764,52	809,20
Kalimantan Barat	772,81	832,10
Kalimantan Tengah	411,33	406,09
Kalimantan Selatan	762,04	792,74
Kalimantan Timur	789,44	777,75
Sulawesi Utara	553,40	561,65
Sulawesi Tengah	459,79	490,36
Sulawesi Selatan	1 999,53	1 979,60
Sulawesi Tenggara	402,53	430,46
Gorontalo	260,89	267,44
Sulawesi Barat	211,45	205,40
Maluku	337,83	351,25
Maluku Utara	223,56	228,71
Papua Barat	147,40	168,21
Papua	416,19	398,93
Indonesia	52 448,92	52 720,58

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012
(Persen)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	18,00	49,91	34,15	17,48	51,31	34,59
Sumatera Utara	13,65	36,88	25,45	13,13	37,96	25,74
Sumatera Barat	15,43	43,99	30,08	15,25	44,93	30,48
Riau	13,07	54,37	33,09	12,61	51,02	31,22
Jambi	13,64	48,29	30,60	12,70	50,04	30,98
Sumatera Selatan	12,72	40,56	26,45	14,27	39,50	26,71
Bengkulu	13,75	37,01	25,15	12,53	37,27	24,65
Lampung	11,08	45,99	28,02	12,60	45,67	28,64
Bangka-Belitung	11,57	54,07	31,89	11,70	53,19	31,54
Kepulauan Riau	11,61	50,71	30,67	13,02	52,08	32,06
DKI Jakarta	14,68	43,95	29,17	13,30	46,44	29,71
Jawa Barat	14,58	57,47	35,74	14,29	58,65	36,17
Jawa Tengah	15,22	41,14	28,42	14,18	39,76	27,20
D I Y	19,76	38,87	29,53	20,90	39,26	30,29
Jawa Timur	14,37	45,75	30,45	14,12	45,80	30,36
Banten	12,38	49,63	30,64	12,75	50,08	31,05
Bali	15,56	29,58	22,58	14,94	29,55	22,25
Nusa Tenggara Barat	17,00	43,03	30,73	16,10	44,06	30,84
Nusa Tenggara Timur	15,61	34,34	25,23	15,80	36,79	26,59
Kalimantan Barat	13,32	38,19	25,50	13,84	41,55	27,41
Kalimantan Tengah	12,06	41,83	26,21	12,47	40,48	25,78
Kalimantan Selatan	12,81	44,87	28,76	12,66	47,10	29,79
Kalimantan Timur	11,07	51,71	30,11	10,01	51,42	29,41
Sulawesi Utara	15,63	51,32	33,18	14,78	53,03	33,59
Sulawesi Tengah	10,76	40,68	25,37	10,66	44,00	26,94
Sulawesi Selatan	16,05	53,11	35,44	15,91	52,41	35,01
Sulawesi Tenggara	12,72	40,82	26,90	14,50	42,51	28,63
Gorontalo	15,51	55,52	35,64	16,43	56,02	36,35
Sulawesi Barat	13,54	40,90	27,36	14,59	38,00	26,42
Maluku	18,95	47,06	33,02	18,58	49,61	34,12
Maluku Utara	16,67	48,32	32,18	16,65	49,49	32,74
Papua Barat	15,12	42,23	27,73	16,86	48,08	31,38
Papua	12,10	30,42	20,73	10,26	30,14	19,63
Indonesia	14,33	46,29	30,34	14,07	46,67	30,40

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Mei 2012

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah		Pendidikan Menengah		Pendidikan Tinggi	
	Februari	Mei	Februari	Mei	Februari	Mei
N A D	58,58	59,01	29,13	28,81	12,29	12,18
Sumatera Utara	61,55	61,67	30,52	29,91	7,93	8,41
Sumatera Barat	60,45	60,10	28,35	29,40	11,20	10,50
Riau	58,78	58,30	31,83	31,87	9,39	9,83
Jambi	66,34	67,28	22,99	22,62	10,67	10,10
Sumatera Selatan	67,51	68,27	24,61	23,04	7,88	8,69
Bengkulu	68,44	66,45	23,16	24,63	8,40	8,92
Lampung	71,96	71,39	21,69	21,72	6,36	6,90
Bangka-Belitung	66,57	66,83	26,32	25,93	7,10	7,24
Kepulauan Riau	47,73	47,89	39,45	36,66	12,83	15,45
DKI Jakarta	34,58	34,76	41,73	42,22	23,69	23,02
Jawa Barat	66,49	66,37	25,25	24,79	8,26	8,84
Jawa Tengah	74,29	73,96	18,35	19,15	7,35	6,89
D I Y	52,13	49,31	33,15	35,20	14,72	15,49
Jawa Timur	71,38	71,17	20,91	20,74	7,71	8,09
Banten	60,70	61,19	29,30	28,54	9,99	10,27
Bali	60,15	60,48	30,02	29,78	9,84	9,74
Nusa Tenggara Barat	71,03	71,03	21,15	20,90	7,82	8,07
Nusa Tenggara Timur	77,93	78,00	14,42	14,98	7,66	7,03
Kalimantan Barat	76,94	76,32	17,41	18,01	5,65	5,68
Kalimantan Tengah	70,70	71,92	19,82	19,30	9,48	8,78
Kalimantan Selatan	71,08	71,78	20,31	20,01	8,60	8,21
Kalimantan Timur	51,47	51,92	35,41	35,13	13,12	12,96
Sulawesi Utara	58,98	58,35	32,37	32,68	8,65	8,97
Sulawesi Tengah	66,94	67,80	22,05	22,19	11,02	10,01
Sulawesi Selatan	65,02	66,89	22,73	21,52	12,25	11,59
Sulawesi Tenggara	61,76	63,13	25,38	23,00	12,86	13,87
Gorontalo	75,06	74,22	17,14	17,75	7,80	8,03
Sulawesi Barat	73,55	74,71	17,72	17,73	8,73	7,56
Maluku	60,65	60,09	28,17	28,05	11,18	11,86
Maluku Utara	65,07	62,46	24,80	26,04	10,14	11,50
Papua Barat	59,62	58,15	29,05	29,91	11,33	11,95
Papua	75,78	76,79	17,89	17,36	6,33	5,85
Indonesia	66,14	66,14	24,58	24,46	9,28	9,39

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari dan Mei 2012
(Rupiah)

Lapangan Usaha	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	1 159 007	814 646	1 087 425	1 173 915	837 501	1 100 754
2	3 059 372	5 259 020	3 197 048	3 096 619	5 209 464	3 242 954
3	1 467 250	992 353	1 300 663	1 491 426	1 064 008	1 335 358
4	2 089 835	1 701 523	2 036 025	1 886 973	2 125 575	1 911 998
5	1 505 135	2 181 707	1 526 011	1 491 083	2 013 768	1 502 914
6	1 296 124	1 092 062	1 221 410	1 367 923	1 109 338	1 269 799
7	1 682 235	1 828 309	1 697 951	1 703 196	2 003 314	1 731 397
8	2 171 189	2 113 220	2 153 826	2 181 094	2 355 115	2 227 683
9	2 057 697	1 481 862	1 772 244	2 117 837	1 498 814	1 812 116
Total	1 707 229	1 346 733	1 580 882	1 727 777	1 365 545	1 600 880

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari dan Mei 2012
(Rupiah)

Lapangan Usaha	Februari			Mei		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	1 400 288	980 474	1 087 425	1 314 989	1 032 895	1 100 754
2	4 194 448	1 975 334	3 197 048	4 239 860	2 011 332	3 242 954
3	1 397 578	1 043 314	1 300 663	1 444 189	1 064 666	1 335 358
4	2 167 473	1 434 787	2 036 025	1 994 924	1 545 103	1 911 998
5	1 660 571	1 274 423	1 526 011	1 648 397	1 266 462	1 502 914
6	1 299 187	894 397	1 221 410	1 340 431	964 528	1 269 799
7	1 846 657	1 240 154	1 697 951	1 901 281	1 261 116	1 731 397
8	2 297 046	1 370 121	2 153 826	2 337 957	1 578 412	2 227 683
9	1 866 430	1 550 355	1 772 244	1 897 027	1 613 260	1 812 116
Total	1 718 710	1 267 024	1 580 882	1 740 869	1 298 924	1 600 880

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
Februari dan Mei 2012
(Rupiah)

Provinsi	Februari			Mei		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
N A D	1 629 425	1 454 936	1 567 938	1 651 261	1 475 273	1 591 987
Sumatera Utara	1 553 225	1 331 042	1 477 509	1 582 989	1 342 798	1 503 311
Sumatera Barat	1 781 490	1 623 339	1 716 548	1 788 667	1 638 403	1 730 652
Riau	1 934 943	1 542 009	1 817 708	1 966 098	1 566 803	1 849 590
Jambi	1 490 708	1 208 226	1 395 505	1 533 710	1 254 056	1 445 128
Sumatera Selatan	1 531 284	1 362 247	1 475 073	1 543 211	1 378 672	1 485 994
Bengkulu	1 688 165	1 429 159	1 587 207	1 710 768	1 468 923	1 615 051
Lampung	1 265 053	1 135 020	1 220 779	1 293 040	1 164 191	1 248 680
Bangka-Belitung	1 697 702	1 256 513	1 572 816	1 731 264	1 281 660	1 603 476
Kepulauan Riau	2 451 822	1 884 942	2 277 302	2 492 443	1 900 480	2 296 748
DKI Jakarta	2 330 764	1 796 196	2 129 674	2 365 447	1 822 317	2 164 811
Jawa Barat	1 699 969	1 397 948	1 606 107	1 706 334	1 424 554	1 617 525
Jawa Tengah	1 390 415	1 032 656	1 239 756	1 411 510	1 045 700	1 257 493
D I Y	1 556 348	1 195 514	1 411 850	1 582 881	1 240 919	1 444 903
Jawa Timur	1 392 158	1 052 732	1 269 162	1 419 483	1 066 632	1 291 751
Banten	1 997 147	1 562 887	1 843 011	2 034 428	1 591 350	1 872 678
Bali	1 719 477	1 407 255	1 602 365	1 730 916	1 436 365	1 620 302
Nusa Tenggara Barat	1 591 796	1 073 242	1 400 838	1 624 277	1 101 810	1 448 391
Nusa Tenggara Timur	1 610 449	1 486 758	1 565 614	1 624 765	1 511 825	1 585 298
Kalimantan Barat	1 576 674	1 249 602	1 486 738	1 596 427	1 292 340	1 516 083
Kalimantan Tengah	1 835 232	1 575 115	1 760 979	1 867 648	1 605 548	1 794 056
Kalimantan Selatan	1 775 473	1 400 164	1 669 845	1 792 900	1 420 083	1 685 821
Kalimantan Timur	2 405 047	1 708 072	2 221 001	2 420 278	1 739 438	2 229 948
Sulawesi Utara	1 749 939	1 779 680	1 760 125	1 768 011	1 784 897	1 773 353
Sulawesi Tengah	1 630 359	1 377 205	1 538 374	1 658 556	1 399 644	1 569 556
Sulawesi Selatan	1 726 176	1 433 238	1 610 834	1 747 002	1 442 705	1 634 108
Sulawesi Tenggara	1 829 328	1 471 633	1 703 358	1 846 187	1 491 054	1 717 983
Gorontalo	1 487 553	1 302 664	1 407 821	1 533 146	1 316 120	1 440 771
Sulawesi Barat	1 550 237	1 150 903	1 421 915	1 565 709	1 198 068	1 450 174
Maluku	1 864 866	1 761 395	1 828 852	1 905 827	1 776 159	1 860 702
Maluku Utara	1 939 915	1 733 946	1 871 299	1 966 709	1 772 292	1 903 480
Papua Barat	2 140 684	1 929 427	2 092 157	2 155 167	1 958 686	2 110 845
Papua	2 648 316	1 928 739	2 453 955	2 693 339	1 953 202	2 502 993
Indonesia	1 707 229	1 346 733	1 580 882	1 727 777	1 365 545	1 600 880

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,
Februari dan Mei 2012
(Rupiah)

Provinsi	Februari			Mei		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
N A D	1 793 170	1 407 832	1 567 938	1 814 728	1 438 979	1 591 987
Sumatera Utara	1 546 508	1 336 792	1 477 509	1 565 346	1 371 925	1 503 311
Sumatera Barat	1 856 770	1 529 436	1 716 548	1 889 931	1 544 316	1 730 652
Riau	2 133 247	1 431 171	1 817 708	2 150 263	1 505 855	1 849 590
Jambi	1 630 191	1 258 202	1 395 505	1 657 747	1 306 780	1 445 128
Sumatera Selatan	1 681 051	1 218 147	1 475 073	1 693 970	1 242 721	1 485 994
Bengkulu	1 820 696	1 342 708	1 587 207	1 836 077	1 409 856	1 615 051
Lampung	1 441 205	1 045 298	1 220 779	1 467 929	1 098 946	1 248 680
Bangka-Belitung	1 693 108	1 393 375	1 572 816	1 700 988	1 452 742	1 603 476
Kepulauan Riau	2 360 519	1 649 383	2 277 302	2 372 521	1 670 470	2 296 748
DKI Jakarta	2 129 674	-	2 129 674	2 164 811	-	2 164 811
Jawa Barat	1 712 180	1 173 476	1 606 107	1 728 563	1 210 975	1 617 525
Jawa Tengah	1 309 432	1 118 364	1 239 756	1 343 584	1 124 320	1 257 493
D I Y	1 448 927	1 284 696	1 411 850	1 491 276	1 307 860	1 444 903
Jawa Timur	1 387 907	1 013 339	1 269 162	1 398 989	1 050 615	1 291 751
Banten	1 962 882	1 207 716	1 843 011	1 985 776	1 256 986	1 872 678
Bali	1 679 620	1 408 513	1 602 365	1 692 952	1 446 096	1 620 302
Nusa Tenggara Barat	1 508 169	1 250 895	1 400 838	1 552 684	1 274 571	1 448 391
Nusa Tenggara Timur	1 720 664	1 424 516	1 565 614	1 738 460	1 439 626	1 585 298
Kalimantan Barat	1 621 466	1 332 689	1 486 738	1 636 957	1 394 837	1 516 083
Kalimantan Tengah	2 113 980	1 506 176	1 760 979	2 124 358	1 564 632	1 794 056
Kalimantan Selatan	1 797 668	1 515 680	1 669 845	1 812 241	1 532 712	1 685 821
Kalimantan Timur	2 320 944	1 945 995	2 221 001	2 338 248	1 975 023	2 229 948
Sulawesi Utara	1 852 779	1 614 977	1 760 125	1 868 069	1 624 998	1 773 353
Sulawesi Tengah	1 648 783	1 457 956	1 538 374	1 696 866	1 482 313	1 569 556
Sulawesi Selatan	1 840 444	1 310 065	1 610 834	1 892 386	1 350 550	1 634 108
Sulawesi Tenggara	1 963 986	1 478 133	1 703 358	1 974 197	1 514 906	1 717 983
Gorontalo	1 560 312	1 180 158	1 407 821	1 615 512	1 237 540	1 440 771
Sulawesi Barat	1 542 793	1 326 418	1 421 915	1 563 768	1 355 490	1 450 174
Maluku	1 908 784	1 691 364	1 828 852	1 949 241	1 708 899	1 860 702
Maluku Utara	2 132 133	1 673 063	1 871 299	2 162 622	1 710 011	1 903 480
Papua Barat	2 222 916	1 979 937	2 092 157	2 246 636	2 002 631	2 110 845
Papua	2 519 144	2 334 991	2 453 955	2 574 179	2 347 194	2 502 993
Indonesia	1 718 710	1 267 024	1 580 882	1 740 869	1 298 924	1 600 880

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Buruh/Karyawan/Pegawai	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Pekerja Bebas di Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Bebas di Non Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Tak Dibayar	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>

Keterangan : F = Formal

INF=Informal

